

**POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENANGGULANGAN BANJIR KALI LAMONG DI  
KABUPATEN GRESIK  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Politik



**Oleh :**

**PURBO RETNO**

**NIM. I01219024**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2023**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Purbo Retno

NIM : 101219024

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan

Banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 14 April 2023

Yang menyatakan

  
**Purbo Retno**

NIM: 101219024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Purbo Retno

NIM : 101219024

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **Politik Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 13 Maret 2023

Pembimbing



**Holilah, S.Ag, M.Si**

NIP. 197610182008012008

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Purbo Retno dengan judul: "Politik Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 April 2023.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Hofilah, S.Ag, M.Si  
NIP. 197610182008012008

Penguji II

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si  
NIP. 196909071994032001

Penguji III

Noor Rohman, M.A  
NIP. 1985101192015031001

Penguji IV

Ajeng Widva Prakasita, M.A  
NIP. 199502232020122025

Surabaya, 03 Mei 2023

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



  
Dr. Afri Chalik, M.Ag  
NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PURBO RETNO  
NIM : I01219024  
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/ILMU POLITIK  
E-mail address : purboretno191@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR KALI  
LAMONG DI KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Maret 2023

Penulis

(PURBO RETNO)

## ABSTRACT

**Purbo Retno, 2023.** *The Politics of Government Policy in Mitigating the Flood in Kali Lamong in Gresik Regency*, Thesis for the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

**Keywords:** Policy Politics, Government, Flood Management, Implementation.

The Kali Lamong flood disaster in Gresik Regency has occurred since 2014 until now. Even though several regents have changed, the floods caused by the overflow of the Lamong River still continue to occur, so researchers are interested in conducting research on the policies of the Gresik district government in dealing with Lamong River floods and the implementation of these policies. This study is about analyzing the implementation of government policies in managing Kali Lamong floods in Gresik Regency and what are the factors causing the non-optimal realization of Gresik Regency government policies in tackling Kali Lamong floods, then what is the Gresik Kali Lamong flood prevention strategy.

In this study, researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The informants for this study included the Gresik Regional Development Planning Agency, the PUTR Office for Water Resources, the secretaries of each village and the people in each village affected by the Gresik Lamong river flood. This study uses data validity checking techniques with triangulation. Then the researcher uses George C. Edward III's implementation theory which has a theoretical basis that refers to four variables, namely: communication, resources, disposition and organizational structure.

The results of this study found that the policy program of the Gresik Regency government in managing Kali Lamong floods was at the regent's *nawakarsa*, namely the Gresik Mapan Program. The Gresik Mapan Program consists of land acquisition and normalization of the Gresik Lamong River. The failure of the management of Kali Lamong flood management in Gresik Regency was caused by the weakness of the bureaucratic structure coupled with the awareness of the community members. This is evidenced by research conducted by researchers showing that on the equipment resource variable, namely land or land on the banks of the Kali Lamong river basin, there are residents' houses and when the land is freed, the residents set a very high price. Factors causing not optimal flood control in Kali Lamong are caused by factors of authority, budget constraints, river characteristics, spatial planning and regional factors and human factors. Then the Gresik Lamong River flood management strategy consists of coordination, management, budget, and people.

## ABSTRAK

**Purbo Retno, 2023.** *Politik Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci :** Politik Kebijakan, Pemerintah, Penanggulangan Banjir, Implementasi.

Bencana banjir kali lamong di Kabupaten Gresik terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Meskipun sudah berganti beberapa bupati akan tetapi banjir yang dikarenakan luapan kali lamong ini masih saja terus terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong serta implementasi kebijakan tersebut. Studi ini mengenai menganalisis mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir kali lamong di Kabupaten Gresik dan apa saja faktor penyebab belum optimalnya realisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong lalu bagaimana strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi Bappeda Gresik, Dinas PUTR bagian Sumber Daya Air, Sekretaris masing-masing desa serta masyarakat di masing-masing desa yang terdampak banjir kali lamong Gresik. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi. Kemudian peneliti menggunakan teori implementasi milik George C. Edward III yang memiliki landasan teori yang mengacu pada empat variabel yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa program kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong berada di nawakarsa bupati yakni Program Gresik Mapan. Pada Program Gresik Mapan ini terdiri dari Pembebasan lahan dan Normalisasi kali lamong Gresik. Kegagalan tata kelola penanggulangan banjir kali lamong di Kabupaten Gresik disebabkan karena kelemahan struktur birokrasi ditambah dengan kesadaran warga masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pada variabel sumberdaya peralatan yakni tanah atau lahan di bantaran daerah aliran sungai kali lamong terdapat rumah warga dan ketika di bebaskan lahannya para warga mematok harga yang sangat tinggi. Faktor penyebab belum optimalnya penanggulangan banjir kali lamong di sebabkan oleh faktor kewenangan, keterbatasan anggaran, faktor karakteristik sungai, faktor tata ruang dan wilayah serta faktor manusia. Kemudian strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik terdiri dari koordinasi, manajemen, anggaran, dan manusia.

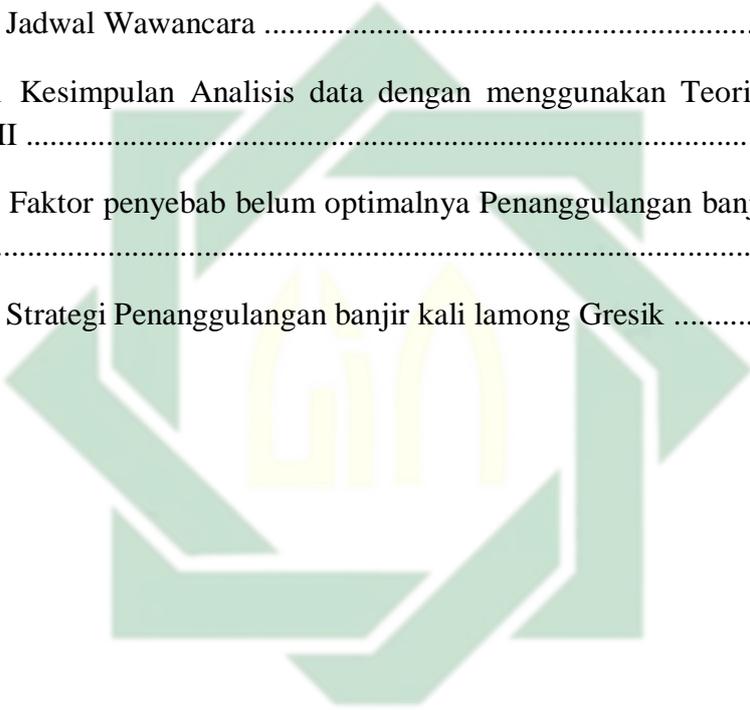
## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Konseptual .....	8
1. Politik Kebijakan.....	8
2. Pemerintah .....	9
3. Penanggulangan Banjir.....	9
4. Implementasi.....	10
BAB II KAJIAN TEORI .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Implementasi Kebijakan George Edward III.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22

A.	Pendekatan Penelitian .....	22
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C.	Informan Penelitian.....	24
D.	Tahap-Tahap Penelitian .....	25
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
F.	Teknik Analisis Data.....	30
G.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
H.	Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>		<b>34</b>
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
1.	Gambaran Umum Kali Lamong Gresik .....	34
B.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	37
1.	Normalisasi Kali Lamong.....	42
2.	Pembebasan Lahan untuk Pembuatan Tanggul .....	45
C.	Analisis Data .....	51
1.	Analisis Data dengan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III .....	51
2.	Faktor penyebab belum optimal nya penanganan banjir kali lamong Gresik .....	73
3.	Strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>88</b>
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran .....	89
<b>A. LAMPIRAN .....</b>		<b>94</b>
1.	Pedoman Wawancara .....	94
2.	Dokumentasi Penelitian .....	98
3.	Jadwal Penelitian .....	102
4.	Surat Keterangan Bukti Melakukan Penelitian .....	104
5.	Surat Keterangan Lulus Plagiasi .....	106
<b>B. BIODATA .....</b>		<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

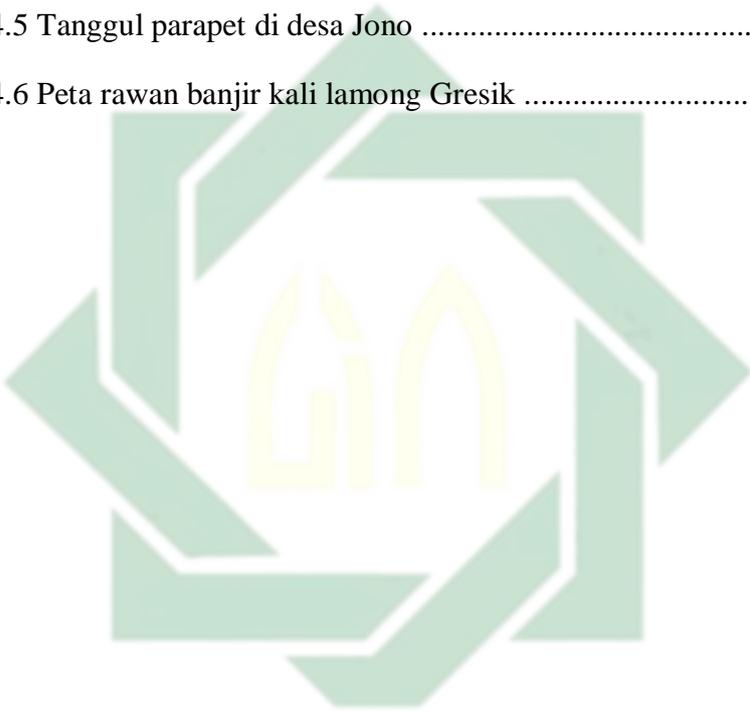
Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitan .....	32
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Penelitian .....	34
Tabel 3.3 Jadwal Wawancara .....	37
Tabel 4.1 Kesimpulan Analisis data dengan menggunakan Teori Implementasi Edward III .....	79
Tabel 4.2 Faktor penyebab belum optimalnya Penanggulangan banjir kali lamong Gresik .....	87
Tabel 4.3 Strategi Penanggulangan banjir kali lamong Gresik .....	93



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Daerah Aliran sungai kali lamong .....	43
Gambar 4.2 Peta Daerah terdampak banjir Kali Lamong Gresik .....	44
Gambar 4.3 Kali Lamong di Desa Gluronploso .....	46
Gambar 4.4 Normalisasi kali lamong di desa Gluronploso .....	51
Gambar 4.5 Tanggul parapet di desa Jono .....	54
Gambar 4.6 Peta rawan banjir kali lamong Gresik .....	89



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Latar belakang terjadinya banjir kali lamong di daerah kabupaten Gresik ini dikarenakan lambatnya kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi masalah bencana banjir yang terjadi tiap tahunnya. Meskipun sudah ganti bupati hingga dua kali akan tetapi masalah banjir kali lamong hingga saat ini belum terselesaikan. Pada dasarnya Kali Lamong ini merupakan sungai yang memiliki panjang 131 kilometer yang tiap tahunnya dapat mengakibatkan bencana bagi puluhan ribu warga di sekitar aliran sungainya, mulai dari kabupaten Lamongan, Mojokerto, Gresik, Surabaya. Akan tetapi terdapat daerah lain, yang mendapat bencana banjir karena oleh ulah manusia yang berada di hulu, hilir ataupun daerah sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penertiban untuk daerah bantaran sungai atau kali seperti pengerukan, normalisasi, dan juga rehabilitasi hutan.

Kebijakan merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat berikut merupakan pengertian kebijakan menurut Noeng Muahdjir.<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik kebijakan adalah sebuah keputusan atau intruksi yang berkaitan dengan politik dari berbagai peraturan pemerintah.

Bencana banjir Sungai Lamong pada Maret 2019 merupakan yang terparah karena merendam 54 desa, 16 sekolah, 24 tempat ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 14 gedung pemerintah, 1 pasar, 9.991 rumah, jalan raya 3.950 meter, jalan poros desa 22.525 meter, 50.950 meter jalan lingkungan, 2.290 ha sawah, 2.397 ha tambak, 46.758 warga terdampak, dan 4 korban jiwa. Setiap tahun, berbagai daerah

---

<sup>2</sup> Noeng Muahdjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

dilanda banjir bahkan terendam oleh luapan Kali Lamong.<sup>3</sup> Kabupaten Gresik sudah sering terkena banjir karena luapan kali lamong yang menyebabkan masyarakat merasa sengsara. Banjir kali lamong ini menyebabkan banyak kerugian contoh nya saja kerusakan rumah, jalan raya dan desa, lalu kerugian sawah dan bahkan sampai korban jiwa.

Banjir Kali lamong yang terjadi tiap tahunnya ini terjadi karena meluapnya kali lamong karena tidak dapat menampung debit air yang masuk. Sehingga luapan Kali Lamong tersebut dapat menyebabkan banjir di sebagian wilayah di Kabupaten Gresik yaitu di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom dan Kedamaian. Banjir kali lamong ini dapat menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terdampak, oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir dampak banjir kali lamong ini.

Banjir Kali Lamong yang terjadi sejak pertengahan Desember 2013 sampai awal Januari 2014 telah menenggelamkan sekitar 2.658,2 hektar areal pertanian, dimana tanaman padi yang terkena banjir di area seluas 1985 hektar telah di nyatakan puso dan banjir yang terparah terjadi pada tahun 2019. Di pertengahan tahun 2019, Bencana banjir Kali lamong menyebabkan empat kecamatan di Kabupaten Gresik terendam seperti Kecamatan Meganti, Cerme, Balongpanggang dan Benjeng, berita ini bersumber dari Suarajatim.id tahun 2020.

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo bertugas mengelola sungai Kali Lamong. Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya yang merupakan sumber DAS Kali Lamong. Sungai Kali Lamong mengalir sepanjang 131 kilometer (km) dengan panjang 54 kilometer di wilayah Kabupaten Gresik. Kali Lamong meluap saat musim hujan setiap tahun karena tidak mampu menangani debit air. Sehingga warga yang berada di pinggiran sungai kali lamong terganggu tiap tahunnya karena hal tersebut. Sudah banyak

---

<sup>3</sup> Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla dan Diana Hertati “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik” Jurnal Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran

upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi banjir kali lamong ini akan tetapi tetap saja banjir masih terus terjadi di tiap tahunnya. Kabupaten Gresik yang sebagai daerah industri penting yang ada Jawa Timur sudah seharusnya aman dari ancaman banjir.

Setiap tahun luapan kali lamong di wilayah selatan Gresik terus merendam dan membanjiri Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kedamean. Badan sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan sepanjang 6 km di wilayah antara Sedapurklagen hingga Munggugianti. Dalam jarak tersebut juga terdapat masyarakat yang tidak memiliki tanggul, antara lain 1 km di Desa Gluranploso di Kecamatan Benjeng dan 1 km di Morowudi di Kecamatan Cerme. Karena tanggul tersebut sudah rusak dan beralih fungsi menjadi pemukiman warga.<sup>4</sup>

Kondisi Kali Lamong sebelum tahun 1980-an, masih normal. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman fungsi kali lamong berubah menjadi pemukiman warga dan banyak bangunan yang berada di bantaran sungai kali lamong. Husni Syarwanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menyebutkan, bahwa di bantaran Kali Lamong yang ada disepanjang wilayah Kabupaten Gresik kini terdapat kurang lebih 1.300 bangunan dan 17 unit industri. Tiap tahun selalu terjadi pendangkalan secara terus-menerus hingga laju pendangkalan sedementasi-nya (pengendapan) 12 cm per tahunnya. *“Pendangkalan hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 4 meter yang menyebabkan alur Kali Lamong yang berada di morowudi dan cerme memiliki kerusakan yang cukup parah. Pada tahun 2008 teradi pengerukan yang terakhir akan tetapi hal tersebut tidak mampu mencegah luapan air”* Kata Husni Syarwanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.<sup>5</sup>

Badan Kali Lamong secara topografis sangat landai yang membuat air tidak cepat teralirkan ke laut. Sehingga saat terjadi hujan deras lalu air laut pasang,

---

<sup>4</sup> <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/02/17/761/> Di akses pada 10 April 2022

<sup>5</sup> <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/02/17/761/> Diakses Pada 10 April 2022

maka menyebabkan permukaan air Kali Lamong meluap atau naik melebihi bibir permukaan sungai sehingga menggenangi pemukiman warga disekitarnya dan sawah. Apalagi, sebagian waduk-waduk di sekitar Kali Lamong yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara air (retensi) malah dibuat oleh warga setempat disewakan seperti untuk memelihara ikan atau ditanami tanaman.

Berdasarkan artikel yang berjudul “Kali Lamong Meluap Lagi, Ratusan Rumah Warga di Gresik Kebanjiran Lagi” terbitan Jawa Pos, 10 Februari 2022, diketahui jika Kali Lamong meluap lagi. Beberapa desa di wilayah Kecamatan Benjeng dan Balongpangong, Kabupaten Gresik, kebanjiran lagi. Ketinggian air antara 50-70 sentimeter. Debit air meluap setelah beberapa hari terakhir ini hujan mengguyur kota Gresik ditambah lagi kiriman air dari hulu. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Gresik, di Kecamatan Balongpanggang terdapat tiga desa terdampak banjir Kali Lamong. Yakni, Desa Dapet, Desa Sekarputih, Desa wotansari jalan lingkungan terendam sepanjang 200 meter dan 13 rumah warga tergenang. luapan air dari Kali Lamong menggenangi jalan lingkungan dan jalan poros desa. Rata-rata ketinggian air antara 20-70 sentimeter.

Adapun di kecamatan Benjeng, kawasan yang terdampak banjir adalah Desa Lundo. Air menggenangi jalan lingkungan dengan ketinggian mencapai 70 sentimeter. Desa lain di Kecamatan Benjeng yang kebanjiran adalah Desa Sedapurklagen. Sebanyak 95 rumah warga tergenang. Selain itu, air juga menggenangi JPD dan jalan lingkungan serta area persawahan dengan luas sekitar 75 hektare. Lalu, di Desa Deliksumber, air juga merendam sebanyak 148 rumah dan sawah seluas 45 hektare,

Tarso Sagito selaku Kepala BPBD Pemkab Gresik mengatakan, bahwa “*Sejak air Kali Lamong terpantau meluap petugas pun mulai diterjunkan ke lokasi tersebut debit air Kali Lamong menurun dari pantauan dari petugas yang bertugas dapat berpotensi mengalami kenaikan. Disebabkan oleh hujan deras dan juga mendapar air kiriman dari wilayah hulu yang tinggi juga*”. Sehingga Kepala

BPBD Pemkab Gresik memberitahu bahwa warga masyarakat yang berada di sekitar DAS (daerah aliran sungai) Kali Lamong untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi bahwa sejak awal bulan Januari hingga Februari akan terjadi puncak musim penghujan. Kepala BPBD berharap agar luapan air kali lamong cepat surut. Karena pemkab sebelumnya sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pengerukan kali dan normalisasi Kali Lamong serta anak sungai nya.<sup>6</sup> Berbagai upaya pemkab gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong diantaranya yaitu pembuatan tanggul akan tetapi dinilai belum mendapat hasil yang memuaskan.

Banjir kali lamong terjadi sejak pemerintahan bupati Robach Maksud di tahun 2000 lalu bapak Robach Maksud ini kembali menjabat 2 periode yakni tahun 2005-2010. Setelah itu di lanjutkan oleh Sambari Halim ia juga menjabat selama 2 periode. Periode yang pertama di tahun 2010-2015 dan periode kedua di tahun 2015-2019. Dan saat ini Bupati Gresik ialah Fandi Akhmad Yani dan Wakil nya yaitu Aminatun Habibah.<sup>7</sup>

Meskipun bapak Robach Maksud sudah menjabat selama 2 periode begitu pula Bapak Sambari Halim ini, akan tetapi permasalahan banjir kali lamong ini belum teralisasi hingga saat ini sudah berganti bupati yang sekarang yakni bapak Fandi Akhmad Yani. Peran Pemerintahan Kabupaten Gresik pada saat Pemerintahan bapak Robach Maksud dalam menanggulangi banjir kali lamong ini yaitu dengan cara membuat waduk akan tetapi sebagian waduk-waduk di sekitar Kali Lamong yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara air (retensi) malah dibuat oleh warga setempat disewakan seperti untuk memelihara ikan atau ditanami tanaman. Bahkan ketika saat banjir tiba karena luapan kali lamong maka warga sekitar daerah aliran sungai (DAS) berinisiatif sendiri membuat tanggul tanah. Peran Pemerintahan kabupaten Gresik pada saat pemerintahan Sambari Halim saat menanggulangi banjir kali lamong yaitu dengan

---

<sup>6</sup> <https://www.jawapos.com/surabaya/10/02/2022/kali-lamong-meluap-lagi-ratusan-rumah-warga-di-gresik-kebanjiran-lagi/?page=2> Di akses pada 11 April 2022

<sup>7</sup> <https://gresikkab.go.id/profil/bupati> Di akses pada 11 April 2022

cara meninggikan jalan raya serta membuat tanggul di daerah yang beresiko dan rawan banjir. Akan tetapi meskipun sudah melakukan upaya tersebut banjir masih tetap terjadi walaupun tidak separah dari tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masing-masing mengeluarkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk menormalisasikan fisik kali lamong. Lalu dana sebesar Rp. 20 miliar dari APBN pun juga menormalisasikan fisik kali lamong tersebut. Proyek normaliasasi sungai mulai dikerjakan pada pertengahan 2011 dan tahun 2013 ditargetkan sudah rampung. Pada tahun sebelumnya pelaksanaan pembangunan tanggul belum maksimal dilakukan karena di wilayah Gresik terkendala oleh pembebasan lahan. Yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap hingga 40 persen. Akibatnya, meskipun Kepala Daerah dan DPRD telah memberikan dukungan yang memadai tetapi juga belum efektif, dapat kita lihat bahwa sistem administrasi proyek, hubungan antar lembaga pemerintah, dan pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik.<sup>9</sup>

Melihat kondisi bencana banjir karena luapan kali lamong tersebut beserta kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam menanggulangi nya maka penulis akan melakukan studi analisis mengenai implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Gresik pada periode Bupati Fandi Akhmad Yani dalam menanggulangi banjir kali lamong serta untuk melihat apa saja faktor penyebab tidak terealisasinya kebijakan peemrintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong serta bagaimana strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik. Hal tersebut menarik untuk dikaji dan dijadikan penelitian sehingga penulis tertarik mengangkat judul skripsi penelitian yaitu “Politik Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Kali Lamong di Kabupaten Gresik” Dengan judul tersebut maka peneliti akan menggunakan Teori milik Georag C. Edward III karena teori ini menganalisis mengenai Implentasi dari suatu kebijakan publik. Tentunya penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan tidak

---

<sup>8</sup> Data Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, Saat Kejadian Banjir Kali Lamong Gresik, Jawa Timur.

<sup>9</sup> Eko Budi Santoso “*Manajemen Resiko Bencana Banjir kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan*” Jurnal Penaatan Ruang

terlepas peneliti melakukan dengan metodologi dan pendekatan sesuai dengan teori analisis tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan oleh penelitian ini termasuk dalam rumusan masalah. Masalahnya dinyatakan sebagai berikut mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong?
2. Apa saja faktor penyebab belum optimalnya realisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong ?
3. Bagaimana strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk memahami mengenai implementasi teori Edward III pada kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong.
2. Untuk mengetahui mengenai faktor penyebab belum optimalnya realisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong.
3. Untuk mengetahui mengenai strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis memiliki harapan pada penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menanggulangi Banjir Kali Lamong. Serta bermanfaat untuk

memberikan informasi mengenai faktor penyebab tidak terealisasinya kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong. Dan juga sebagai landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan politik kebijakan penanggulangan banjir.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi masyarakat di Daerah Aliran Sungai Kali Lamong yang sering mengalami banjir karena dapat mengetahui kebijakan apa saja yang telah di buat pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah kabupaten Gresik karena dapat melihat realisasi implementasi kebijakan tersebut dalam menanggulangi banjir kali lamong.

## E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah pernyataan yang memiliki arti pada konsep atau sebuah istilah tertentu. Definisi konseptual adalah komponen penting dari penelitian dalam penelitian ini karena membantu untuk memperjelas fitur dari masalah yang harus diselidiki. Untuk meminimalisir kebingungan dalam menginterpretasikan judul penelitian, cara lain untuk memahami definisi konseptual adalah dengan memberikan gambaran secara luas. Berikut penjelasan arti dan istilah judul penelitian oleh peneliti :

### 1. Politik Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat berikut merupakan pengertian kebijakan menurut Noeng Muahdjir.<sup>10</sup> Kemudian menurut Amin Priatna sebagaimana dikutip Wehrich dan Kootz, kebijakan adalah alat untuk mensucikan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam batas. Kebebasan kebijakan saling mempengaruhi, dan sebaliknya, mencerminkan

---

<sup>10</sup> Noeng Muahdjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

kekuatan dan posisi organisasi. Sehingga dapat di simpulkan bahwa politik kebijakan adalah sebuah keputusan atau intruksi yang berkaitan dengan politik dari berbagai peraturan pemerintah.

## 2. Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam interaksi pemerintahan diberikan pelayanan sipil sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang diperintah.<sup>11</sup> Menurut Budiarto, pemerintahan adalah segala perbuatan yang terorganisasi yang bersumber dari kedaulatan dan kemerdekaan yang berdasarkan atas dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara serta mempunyai tujuan untuk membentuk negara berdasarkan pengertian dasar negara.<sup>12</sup> Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah adalah sebuah badan atau organ yang memiliki wewenang untuk melakukan kewajibannya yaitu memberi pelayanan bagi masyarakat warga negara dengan berdasarkan undang-undang atau konsep dasar dari suatu negara tersebut.

## 3. Penanggulangan Banjir

Seperangkat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berlangsung sebelum atau sesudah terjadinya bencana merupakan salah satu aspek pembangunan nasional. Pemerintah bertugas merencanakan dan menangani keadaan darurat. Undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana nomor 24 tahun 2007 mengatur dalam pasal 35 dan 36 bahwa setiap daerah yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana harus memiliki strategi penanggulangan bencana.<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih rinci.<sup>14</sup> Perhatian yang lebih intensif

---

<sup>11</sup> Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6

<sup>12</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21

<sup>13</sup> Undang-Undang (Uu) No. 24, Ln.2007/No.66, Tln No.4723, Tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

terhadap penanganan masalah banjir di Kali Lamong mulai gencar dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah kabupaten Gresik menjadikan pengendalian banjir kali lamong sebagai skala prioritas.

#### 4. Implementasi

Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana untuk memberikan keluaran kebijakan kepada publik (kelompok sasaran) dalam upaya implementasi kebijakan.<sup>15</sup> Guntur Setiawan memiliki pandangan yang sama, menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan kegiatan yang menyesuaikan satu sama lain dan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang kuat.<sup>16</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah sebuah kegiatan yang telah direncanakan oleh sebuah pejabat pemerintah yang diarahkan dapat tercapainya sebuah tujuan-tujuan yang telah ada dan disepakati oleh suatu kebijakan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>15</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm 21

<sup>16</sup> Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, edisi 2 (jakarta : Bumi Aksara, 2011)

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian saat ini, penelitian ini juga membutuhkan temuan-temuan dari pengamatan atau penelitian sebelumnya. Peneliti memeriksa data dari studi sebelumnya dalam upaya untuk membuat perbandingan dan keberpihakan, baik dalam kekurangan atau kekuatan, dan mengaitkannya dengan masalah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, peneliti mencari informasi di buku, tesis, dan majalah terkait untuk mengumpulkan referensi.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan riset penulis ialah terletak pada fokus penelitian pada penelitian terdahulu berfokus pada peran BPBD, Dinas PUPR, Mitigasi atau Manajemen Bencana sedangkan penulis mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir kali lamong. Dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu dengan riset penulis ialah terletak pada lokasi banjir. Di penelitian terdahulu lokasi banjir terletak di Jakarta, Sumatra, Kalimantan, Medan, Manado dan Semarang. Sedangkan lokasi penelitian penulis ini berada di Kabupaten Gresik. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan riset penulis ialah terletak metode penelitian yaitu metode kualitatif dan ada beberapa penelitian terdahulu yang terfokus pada penelitian banjir dikarenakan luapan sungai. Penelitian terdahulu mengenai banjir serta yang dapat berkaitan dengan judul penulis juga penting dalam hal membandingkan serta mencari tahu mengenai kesamaan dan perbedaan studi penelitian sebelumnya yang digunakan oleh para peneliti tercantum di bawah ini.

Tabel 2.1

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Yang Telah Dilakukan	Hasil Temuan
1.	Septian Boy Alpin Sitorus, <i>“Peran BPBD dalam penanggulangan Banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”</i> <sup>17</sup>	Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, metode penelitian ini mengadopsi perspektif kualitatif. Metode kami untuk mengumpulkan data meliputi observasi, menuliskan hal-hal, dan melakukan wawancara. Setelah pengumpulan data dilakukan analisis kualitatif dengan mempertimbangkan keseluruhan. Fokus penelitian pada penelitian ini ialah peran BPBD dalam penanggulangan banjir.
2.	Ari Mulianta Ginting, <i>“Dampak Ekonomi dan Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir di DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2020”</i> . <sup>18</sup>	Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Berteori manajemen bencana dari sudut pandang kebijakan publik, Menurut Handmer dan Dovers (2007), wacana framing masalah, framing kebijakan, dan keputusan strategis adalah langkah pertama dalam proses manajemen bencana. Fokus penelitian dalam jurnal ini ialah mengenai dampak ekonomi dan kebijakan mitigasi resiko bencana banjir.
3.	Fachrudin Sembiring, Natalia Yeti Puspita, Angga Reynady Hermawan Putra, <i>“Mitigasi Banjir pada saat Pandemi Covid19: Sudah Siapakah Pemerintah DKI Jakarta?”</i> . <sup>19</sup>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa siap Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola banjir di masa pandemi COVID-19. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber primer dan sekunder secara setara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang kesiapsiagaan

<sup>17</sup> Septian Boy Alpin Sitorus *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”*. Asdaf Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.

<sup>18</sup> Ari Mulianta Ginting *“Dampak Ekonomi dan Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2020”*. Vol.XII, No1/Puslit/Januari/2020

<sup>19</sup> Natalia Yeti Puspita, Fachrudin Sembiring, Angga Reynady hermawan Putra *“Mitigasi Banjir Pada Saat Pandemi Covid 19: Sudah Siapakah Pemerintah DKI Jakarta?”*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undishka Vol.10 No.1 (Februari 2022)

		dan antisipasi bencana banjir.
4.	Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Akhmad Hendryan Dwifama, Muhammad Shofwan Ridhani, Rizka Annisa Falmelia <i>“Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan”</i> . <sup>20</sup>	Pada pertengahan Januari 2021 ini sebanyak 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel terdampak banjir, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan strategi interdisipliner atau “hybrid” antara komponen penelitian hukum normatif dan pendekatan sosiologis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan temuan analisis data sekunder dan data primer terbukti bahwa dalam hal penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberdayakan daerah secara penuh untuk membuat program pembangunan daerah yang mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah.
5.	Eko Budi Santoso, <i>“Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong pada Kawasan Peri-urban Surabaya-Gresik melalui pendekatan kelembagaan”</i> . <sup>21</sup>	Fokus penelitian ini terfokus kepada manajemen risiko bencana banjir dengan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini melakukan eksplorasi terhadap data-data sekunder dan literatur yang berkaitan dengan manajemen risiko bencana. Hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa manajemen risiko bencana pada DAS Kali Lamong harus memperhatikan faktor-faktor tata ruang, kondisi sungai, dan normalisasi sungai. Pendekatan kelembagaan diperlu difokuskan pada pengendalian pemanfaatan bantaran sungai, poses pembebasan tanah, penganggaran pembangunan, dan kewenangan masing-masing lembaga.
6.	Welson Y. Rompas, Indah Putri Rahayu, Salmin Dengo, <i>“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir</i>	Teori Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn adalah salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan

<sup>20</sup> Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Akhmad Hendryan Dwifarma, Rizka Annisa Falmelia, Muhammad Shofwan Ridhani *“Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan”*. Volume 7 Nomer 3 Halaman 150-159 April 2022

<sup>21</sup> Eko Budi Santoso *“Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong pada Kawasan Peri-urban Surabaya-Gresik melalui pendekatan kelembagaan”* Jurnal Penataan Ruang, Volume 8, Nomer 2 Nopember 2013

	<i>Pemerintah Kota Manado</i> ” <sup>22</sup>	dokumentasi. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan yang di buat Pemrintah Kota Manado dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Singkil belum dilaksanakan bahkan belum berjalan pembuatan tanggul dan normalisasi sungai. Dan juga tidak adanya kesadaran warga masyarakat nya unuk membuang sampah pada tempat nya.
7.	Suharto dan Andre Setiawan, <i>“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir(Studi Kasus BPBD Kota Semarang Tahun 2020)”</i> <sup>23</sup>	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk penelitian deskriptif kualitatif ini, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mencirikan suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah Penilaian risiko bencana menjadi landasan bagi program penanggulangan bencana Kota Semarang. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kota Semarang didasarkan pada penelitian tentang risiko bencana.
8.	Dina Mary Pasaribu, <i>“Tinjauan Perundangan terhadap Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan”</i> . <sup>24</sup>	Fokus dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah rencana pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir di kota Medan sudah dijalankan. Metodologi penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah teknik penelitian berbasis positivis yang digunakan untuk meneliti populasi atau kelompok tertentu. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Kota Medan belum mencapai hasil yang optimal dalam menerapkan undang-undang pengendalian banjir. Namun, BPBD memiliki kewenangan dalm penanggulangan bencana tersebut akan

<sup>22</sup> Indah Putri Rahayu, Welson Y. Rompas Salmin Dengo *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Sangkil)”* JAP No.105 Vol. VII 2021

<sup>23</sup> Suharto dan Andre Setiawan *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD Kota Semarang Tahun 2020)”* Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Vol 19, No 2, 2022

<sup>24</sup> Dina Mary Pasaribu *“Tinjauan Perundangan Terhadap Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan”*. Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, November 2021

		tetapi bukti di lapangan menyatakan bahwa BPBD Kota Medan memiliki keterbatasan manusia dalam mengetahui dan mengenali bencana alam.
9.	Candra Hermawan, Masyaja, Burhanudin, <i>“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu”</i> . <sup>25</sup>	Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan observasi, wawancara, untuk lebih mengenal dan menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Pengendalian Banjir melalui Pelayanan Program Pengendalian Banjir (PUPR), bersama masyarakat dan Dinas. Berdasarkan kesimpulan kajian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Samarinda terlibat dalam proyek pengendalian banjir. Berdasarkan temuan studi tersebut, Dinas PUPR telah menjalankan dan melaksanakan program penanggulangan banjirnya. Hanya sebagian kecil dari sekian banyak program pengendalian banjir yang tidak dapat beroperasi secara efektif.
10.	Ach. Apriyanto Romadhan, Ahmad Rusydan Fakhri, Iradhad Taqwa Sihidi, <i>“Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik”</i> . <sup>26</sup>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini yakni pada Implementasi kebijakn pendenaadlian banjir di kawasan sempaaai kali lamong Gresik. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil temuan penelitian ini ialah dalam Implementasi kebijakan pengendalian banjir dikabupaten Gresik dengan melalui pembangunan tanggul dapat dinyatakan cukup berhasil.

## B. Kerangka Teori

Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah konsep yang digunakan peneliti sebagai sebuah alur atau cara berpikir dalam penggunaan teori yang relevan pada berbagai faktor yang ditemukan dan diidentifikasi terhadap masalah

<sup>25</sup> Candra Hermawan, Masjaya, Burhanudin *“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengendalian Banjir di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu”*. Jurnal Pemerintahan, 2019, 7 (1): 465-478

<sup>26</sup> Ach.Apriyanto Romadhan, Ahmad Rusydan Fakhri, Iradhad Taqwa Sihidi *“Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik”* JPAP Volume 8 Nomer 2

penelitian. Dalam kerangka berpikir, peneliti mendeskripsikan konsep dan variabel penelitiannya dalam deskripsi yang terperinci. Sugiono berpendapat mengenai kerangka berpikir, bahwa kerangka berpikir yang baik dapat menjelaskan secara kritis pertautan antara variabel yang berhubungan dan temuan yang diteliti.<sup>27</sup> Kerangka berpikir atau kerangka pikir adalah landasan berpikir dari peneliti yang disintesis dengan fakta-fakta dalam observasi dan telaah kepustakaan, tinjauan pustaka serta teori yang digunakan. Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka berpikir atau kerangka teori adalah sebuah landasan pemikiran dari peneliti yang digabungkan melalui fakta-fakta yang terdapat pada observasi dan studi kepustakaan serta tinjauan teori yang digunakan.

### **1. Teori Implementasi Kebijakan George Edward III**

George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>28</sup> Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C.Edward III (1980) disebutnya dengan *“Direct and Indirect Impact on Implementation”*. Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai *“Policy Implementation ..., is the stage of policy making between the establishment of a policy ..., and the consequence of the policy for the people whom it affects”*<sup>29</sup> (Implementasi kebijakan ..., adalah langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan..., dan konsekuensi dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi). Menurutnya masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention the decision of policy makers will not be carried out successfully*.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan maka harus bisa dipersiapkan dan direncanakan dengan

---

<sup>27</sup> Juliansa Noor, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta : Kencana, 2017) hlm 76.

<sup>28</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya” Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.

<sup>29</sup> E-books *“Implementing Public Policy”* George C Edwards III Congressional Quarterly Press, 1980 Washington DC

baik. Edward menyatakan terdapat empat variabel dalam evaluasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur organisasi. Adapun gambaran mengenai variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan menjadi alasan terjadinya komunikasi tersebut. Agar para pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan berbagai aspek implementasi kebijakan dan memastikan bahwa proses tersebut berhasil, maka informasi tersebut perlu dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan atau pelaku kebijakan sehingga mereka dapat memahami isi, arah tujuan, dan kelompok sasaran kebijakan. Kriteria komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

a) Transmisi (*transmission*)

Penyaluran komunikasi yang baik diperlukan untuk mengembangkan implementasi yang baik pula karena sering terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam penyaluran komunikasi. Kebijakan publik harus dikomunikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran kebijakan maupun pihak lain yang berkepentingan, selain kepada pelaksana kebijakan.

b) Kejelasan (*clarity*)

Kebijakan akan menghentikan implementasi jika komunikasinya tidak jelas, ambigu, atau membingungkan, sehingga kebijakan pelaksana untuk menerima pesan harus eksplisit dan tidak ambigu. Karena pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas ketika menerapkan kebijakan, ada titik di mana ambiguitas pesan kebijakan tidak hanya menghambat implementasi. Tetapi sampai batas tertentu, kurangnya kejelasan dalam komunikasi lain ini mengakibatkan

penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai dengan menetapkan kebijakan.

c) **Konsistensi** (*consistency*)

Untuk berkomunikasi secara efektif, konsistensi dan kejelasan harus digunakan. Karena perintah yang sering berubah-ubah menyebabkan para pelaksana kebijakan sering bingung.<sup>30</sup>

## 2. Sumberdaya

Menurut Edward, variabel sumber daya ini sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Edward III mendefinisikan sumber daya meliputi sumber daya Manusia (Staff), Sumber daya Anggaran, Sumber daya Wewenang dan Sumber daya Peralatan. Berikut penjelasan tentang variabel sumber daya diberikan di bawah ini:

a. **Sumberdaya Manusia (Staff)**

Sumber daya yang paling penting untuk menerapkan strategi adalah sumber daya manusia. Keberhasilan proses penerapan kebijakan bergantung pada personel yang tidak cukup terampil, memadai, atau kompeten di bidangnya. Tidaklah cukup hanya menambah karyawan dan pelaksana jika mereka tidak kompeten oleh karena itu membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan cakap karena keterampilan dan kemampuan itu penting.

b. **Sumberdaya Anggaran**

Edward III mengklaim, karena keterbatasan anggaran, akses masyarakat terhadap layanan berkualitas juga menjadi terbatas. Alasan utama kegagalan pelaksanaan program ini adalah kurangnya insentif yang diberikan kepada para pelaksana. Di Widodo, Edward III memberikan kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi

---

<sup>30</sup> E-books “*Implementing Public Policy*” George C Edwards III Congressional Quarterly Press, 1980 Washington DC

oleh kendala fiskal. Keterbatasan anggaran juga membuat program sulit untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang menyebabkan rendahnya disposisi para pelaku kebijakan.

c. Sumberdaya Wewenang

Karena merupakan bagian dari legitimasi atau kewenangannya, maka pelaksana kebijakan harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan perintah. Kewenangan ini harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Ketika tidak ada otoritas, publik tidak menerima legitimasi kekuasaan pelaksana. Hal ini mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, ketika otoritas formal hadir dalam situasi tertentu, hal itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman tentang seberapa efektif otoritas itu, yang sering terjadi. Di satu sisi, efektivitas akan menurun tatkala wewenang menyeleweng karena ulah pelaksana untuk kepentingan kelompok bahkan kepentingan individu itu sendiri.

d. Sumberdaya Peralatan (Fasilitas)

Agar implementasi berhasil, peralatan atau sumber daya fasilitas sangat penting. Ketersediaan peralatan (fasilitas) yang mendukung sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Menurut Edward III dalam Widodo, sumber daya peralatan yang meliputi bangunan, tanah, dan fasilitas merupakan cara yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan. Semua sumber daya ini akan mempermudah penyampaian layanan untuk mengimplementasikan kebijakan.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana

dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, adalah hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka.

#### **4. Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidak efektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang ditentukan secara politis harus didukung oleh birokrasi yang mengoordinasikan implementasinya secara efektif. Menurut George C. Edward, ada dua kualitas yang harus diikuti untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baik :

##### **a. Standart Operating Prosedur (SOP)**

Standard operational procedure (SOP) adalah penetapan tuntutan internal akan waktu, sumber daya, dan keseragaman dalam suatu organisasi kerja yang rumit dan besar, menurut Winarno. Menurut Edward, keberhasilan juga ditentukan oleh standar operasi yang jelas, pembagian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab antar pelaku, serta hubungan yang tidak

harmonis antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya. Ini juga berlaku untuk mekanisme, sistem, dan prosedur untuk menerapkan kebijakan. penerapan kebijakan.

b. Fragmentasi

“Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan di antara berbagai instansi terpisah yang memerlukan koordinasi,” jelas Winarno. Fragmentasi adalah upaya untuk membagi tanggung jawab atas tugas atau aktivitas karyawan yang berbeda di antara unit kerja yang berbeda.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> E-books “*Implementing Public Policy*” George C Edwards III Congressional Quarterly Press, 1980 Washington DC

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif menjadi metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber baik secara lisan maupun tulisan, yang kemudian akan dideskripsikan dan dijelaskan secara deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif biasanya dilakukan dengan melihat subjek penelitian secara langsung. Ia berusaha untuk berkomunikasi atau terhubung langsung dengan publik sekaligus mendapatkan informasi secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, metode biasanya digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis data dari temuan penelitian dengan menyusun kata-kata atau kalimat sebagai solusi dari pertanyaan penelitian.<sup>32</sup>

Begitu pula menurut pendapat dari John W. Creswell yang memberikan penjelasan terkait pengertian dari penelitian kualitatif yaitu sebagai suatu cara memperoleh informasi yang bertujuan untuk mempelajari masalah sosial maupun masalah manusia berdasarkan atas penciptaan gambar holistik yang dibentuk melalui kata, melaporkan pandangan informan secara jelas serta disusun dalam suatu latar ilmiah.<sup>33</sup>

Hubungan antara peneliti dengan informan, objek, dan subjek penelitian akan dideskripsikan secara langsung dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sudut pandang tersebut di atas. Mirip dengan penelitian deskriptif yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menyampaikan informasi tentang politik kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong serta imlementasi kebijakan yang

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2006), edisi revisi, 3.

<sup>33</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, ed. Rusmini (Jambi: Pustaka Jambi, 2017).

dibuat tersebut sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan data dari temuan kemudian dideskripsikan dan dinyatakan secara menyeluruh untuk mencerminkan dengan benar data yang telah dikumpulkan di lapangan.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat atau objek untuk dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yakni di Desa Jono Kecamatan Cerme dan Desa Gluronploso Kecamatan Benjeng. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di desa tersebut yang paling sering terdampak banjir kali lamong serta normalisasi kali lamong berada di desa tersebut.

Dua bulan dihabiskan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hal ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan ada beberapa kendala yang belum terealisasikan dan untuk melakukan wawancara juga harus menyesuaikan waktu dari narasumber yang akan di wawancarai. Oleh karena itu, proses penelitian ini dijelaskan dalam rangkuman tabel kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

### Lokasi dan Waktu Penelitian

No	Lokasi Penelitian	Alamat	Waktu Penelitian
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Gresik	Jalan DR Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik	05 Januari 2023
2.	Kantor Kepala Desa Jono Kecamatan Cerme, Kab. Gresik	Jalan. Jono No.01 Kecamatan Cerme Gresik	06 Januari 2023
3.	Desa Jono	Jalan. Jono No.01 Kecamatan Cerme Gresik	06 Januari 2023
4.	Kantor Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	Jl. Raya Benjeng No.8, Bangkelolor, Bulurejo, Kec. Benjeng, Kabupaten Gresik	06 Januari 2023
5.	Dinas PUTR Gresik	Jalan DR Wahidin Sudirohusodo No. 247, Gresik	11 Januari 2023
6.	Kantor Kepala Desa Gluron Ploso	Desa Gluronploso, Benjeng Gresik	11 Januari 2023

7.	Desa Gluronploso	Desa Gluronploso, Benjeng Gresik	11 Januari 2023
8.	Desa Gluronploso	Desa Gluronploso, Benjeng Gresik	05 Februari 2023

### C. Informan Penelitian

Purposive sampling digunakan untuk memilih informan subjek penelitian setelah melalui pertimbangan dan seleksi yang matang agar dapat memberikan data yang paling lengkap dan melimpah.<sup>34</sup> Untuk mempertimbangkan kriteria yang peneliti tetapkan sehingga keterwakilan mereka dalam populasi dapat diperhitungkan, peneliti menggunakan teknik sampel purposive dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

Orang yang diminta untuk menyumbangkan informasi mengenai suatu fakta atau opini disebut informan penelitian atau responden. Objek yang akan diteliti oleh peneliti disebut sebagai subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data, maka subjek dari mana data dapat dikumpulkan adalah orang yang menjawab atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan.

Menemukan partisipan studi, atau informan seperti yang dikenal dalam penelitian kualitatif, merupakan langkah awal dalam proses pengumpulan data. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa informan teridentifikasi secara akurat karena mereka memegang kunci untuk memberikan informasi dan solusi bagi rumusan tantangan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, partisipan penelitian disebut sebagai informan atau informan. Menurut Tatang Amirin, informan adalah orang yang berfungsi sebagai sumber informasi dan pemasok data untuk kesulitan penelitian.<sup>36</sup> Jika peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data, maka subjek dari mana data dapat dikumpulkan adalah orang yang menjawab atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan. Topik penelitian merupakan

<sup>34</sup> Suharsimi dan Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 28

<sup>35</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017)

<sup>36</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm 135.

sumber data yang diungkap untuk menyajikan fakta lapangan yang relevan. Pemilihan partisipan penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara jelas dan menyeluruh. Berikut tabel informan yang diwawancarai oleh peneliti :

**Tabel 3.2**

**Daftar Nama Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Status Informan</b>
1.	Ir. Moh Hilmi, MT	Perencana Ahli Muda Bappeda Gresik
2.	Suyono	Sekretaris Desa Jono
3.	Maria Ulfa	Ibu PKK
4.	Sugiharti	Warga Desa Jono
5.	Muhammad Zainuri	Staff Kecamatan Benjeng Bidang Pembangunan
6.	Ubaidillah, ST, MT.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR
7.	Kemadi	Staff Kelurahan Gluronploso
8.	Sujina	Warga Desa Gluronploso
9.	Suyitno	Kepala RW Desa Gluronploso
10.	Prianto	Ketua Karang Taruna Desa Gluronploso

Sumber data primer dan sekunder adalah dua kategori di mana sumber data penelitian dibagi. Informasi penting yang dapat diperoleh secara langsung melalui studi dikenal sebagai data primer. Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber di media lain, seperti buku, surat kabar, video, dan lain-lain, tetapi masih terkait dengan definisi masalah penelitian.

**D. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, tahapan-tahapan penelitian sangat di butuhkan untuk menyusun sebuah laporan hasil penelitian. Pada penelitian ini

peneliti menggunakan empat tahapan yang dikemukakan oleh Lexy J.Moleong, yaitu :<sup>37</sup>

#### 1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi lapangan langsung untuk mengamati dan menilai proses sosial. Maka diperlukan pengamatan dan penelaahan terhadap kasus yang akan diteliti dengan cara melihat pandangan teori oleh para ahli dengan realita yang terjadi di lapangan. Kesenjangan yang ditemukan antara teori dengan keadaan yang ada di lapangan sebagai realitas, hal ini yang dinamakan sebagai masalah.<sup>38</sup> Setelah itu dilanjutkan dengan membuat proposal penelitian untuk mendapatkan izin penelitian guna melakukan pendataan kerja lapangan. Pada tahapan ini juga peneliti menyusun rancangan penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, definisi konsep mengenai kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka dibutuhkan rancangan untuk menentukan informan. Informan dapat dipahami sebagai subjek penelitian yang akan memberikan informasi terkait keadaan di lapangan, oleh karena itu peneliti menentukan informan yang sesuai untuk memperoleh data. Mempersiapkan perlengkapan lapangan dilakukan untuk melihat keorisinalan penelitian sehingga dibutuhkan alat tulis serta handphone untuk merekam. Peneliti menggunakan kamera handphone untuk mendokumentasikan penelitian.

#### 2. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperolehnya ketika saat turun ke lokasi penelitian yang sudah dipilih. Pada saat memasuki lapangan maka peneliti mulai melakukan

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya. Hlm 22.

<sup>38</sup> amsu, Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)

interaksi sosial serta menyesuaikan sikap yang harus ditunjukkan pada subjek penelitian. Tahapan ini, peneliti perlu membangun hubungan yang baik dengan subjek yang diteliti karena dengan adanya hubungan baik tersebut, maka hasil penelitian akan sesuai seperti yang diharapkan. Peneliti juga mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara pada informan.<sup>39</sup>Selain melakukan observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai bagian dari proses pengumpulan data, peneliti juga memfokuskan pada politik respon pemerintah Kabupaten Gresik terhadap banjir Kali Lamong.

### 3. Tahap Analisis data

Tahap selanjutnya adalah analisis data, ketika peneliti mengumpulkan data untuk dipelajari dan memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari observasi partisipan, pengumpulan dokumen, dan wawancara informan. Setelah melakukan wawancara serta observasi dan dokumentasi maka peneliti mulai menganalisis data yang di peroleh ketika wawancara. Data tersebut tidak hanya berupa hasil wawancara akan tetapi data berupa dokumen-dokumen yang di peroleh saat wawancara. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah pemahaman mengenai hasil temuan yang di dapatkan peneliti.

### 4. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti pada tahap ini menyusun laporan penelitian, dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan yang dibuat sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti mulai memberikan penjelasan mengenai seluruh hasil data yang telah diperoleh melalui beberapa tahap penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti harus menjelaskan sesuai data yang didapatkan dari penelitian di

---

<sup>39</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

lapangan agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kevalidan dan keabsahannya

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif memiliki sifat eksploratif yang harus melibatkan mengenai analisis dan penelitian yang mendalam dan difokuskan untuk memperoleh hasil yang sempurna. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

### a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian oleh peneliti.<sup>40</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi adalah sebuah teknik atau kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Dengan alat bantu berupa kamera, buku dan alat tulis. Saat melakukan kegiatan observasi peneliti terjun ke lapangan secara langsung sehingga peneliti dapat melihat, mengamati dan menganalisis mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Jono dan Desa Gluron Ploso yang mana di Desa tersebut saat ini sedang dilaksanakan proyek normalisasi kali lamong.

### b. Wawancara

Wawancara adalah *"pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan, yang berpuncak pada komunikasi pertemuan tentang masalah tertentu,"* menurut Esterberg seperti dikutip oleh Sugiyono.<sup>41</sup> Proses wawancara yaitu memberikan tanggapan untuk sebuah topik tertentu.

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Gresik dalam

---

<sup>40</sup> Moh Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm 175

<sup>41</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 72

penanggulangan banjir kali lamong dari informan penelitian yaitu Bappeda, Dinas PUTR, Sekretaris Desa, Pengawas lapangan dan warga masyarakat yang terdampak banjir kali lamong.

Dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam agar mendapatkan informasi secara terperinci dan detail. Informan dalam kegiatan wawancara ini adalah :

**Tabel 3.3**

**Jadwal Wawancara**

No	Tanggal	Lokasi wawancara	Waktu pelaksanaan	Nama informan
1.	05 Januari 2023	Bappeda Gresik	08.20 WIB	Ir. Moh. Hilmi MT
2.	06 Januari 2023	Balai Desa Jono	09.50 WIB	Suyono
3.	06 Januari 2023	Desa Jono	10. 35	Maria Ulfa
4.	06 Januari 2023	Desa Jono	11.10	Sugiharti
5.	06 Januari 2023	Kantor Kecamatan Benjeng	13.15	Muhammad Zainuri
6.	11 Januari 2023	Dinas PUTR	09.00	Ubaidillah, ST, MT.
7.	11 Januari 2023	Balai Desa Gluronploso	12.00	Kemadi
8.	11 Januari 2023	Desa Gluronploso, Benjeng	14.00	Sujina
9.	05 Februari 2023	Desa Gluronploso, Benjeng	11.00	Suyitno
10	05 Februari	Desa Gluronploso, Benjeng	12. 40	Prianto

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dari data yang telah direkam dengan berbagai cara dikenal sebagai dokumentasi. Dokumentasi merupakan refensi yang dipakai oleh peneliti guna mendukung penelitian ini. Menurut

Arikunto, dokumentasi dilakukan saat peneliti mencari referensi melalui benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, notulen rapat.<sup>42</sup>Data yang diperoleh dengan menggunakan prosedur dokumentasi, atau informasi tertulis, baik internal maupun eksternal, biasanya merupakan data sekunder dan dapat dilihat sebagai cara perolehan data melalui analisis dokumen. Surat pengumuman, undang-undang, peraturan, dan keputusan adalah contoh bahan tertulis internal. Pendekatan ini diambil sambil mencari data dari catatan dan arsip yang penting untuk penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian kualitatif merupakan sebuah proses pelacakan atau pengaturan yang secara sistematis mencatat penelitian lapangan yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti dapat melaporkan hasil penelitian tersebut.<sup>43</sup>

Miles dan Habermas menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.<sup>44</sup> Peneliti menggunakan teknik analisis data milik miles dan habermas berikut tahapan teknik analisis data dari penelitian ini:

### **a. Pertama, yakni reduksi data**

Metode pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan abstraksi data dalam catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Semuanya dicatat selama wawancara dan dicatat selama penelitian data kualitatif, termasuk temuan dari penelitian lain. Jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan pada saat ini cukup besar. Akibatnya, peneliti merangkum, mengelompokkan elemen-elemen kunci, dan berkonsentrasi pada apa yang ingin dia jelajahi.

---

<sup>42</sup> Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*.

<sup>44</sup> 1Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Untuk membuat poin mereka lebih mudah dipahami, peneliti menggunakan bahasa yang terorganisir secara rasional dan metodis. Rumusan masalah yang digunakan sebagai pernyataan penelitian harus dijadikan acuan dalam penyajian data ini sehingga yang diberikan adalah gambaran kondisi yang menceritakan dan menunjuk pada permasalahan yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya peneliti melakukan tahap penarikan kesimpulan tentang temuan dan validasi data sebagai tahap analisis data selanjutnya. Urutan pengolahan data berupa fenomena atau situasi yang ditemui di lapangan dianalisis dengan menarik kesimpulan. Temuan awal yang disajikan hanyalah saran. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi untuk menghindari kesimpulan-kesimpulan data yang kurang jelas. Selain itu peneliti juga harus mempertajam dengan mencari data baru guna menguji keabsahan data. Dengan demikian data-data yang diperoleh dalam penelitian nantinya merupakan data-data yang kredibel.

## **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menilai keakuratan data. Triangulasi adalah proses membandingkan data dari beberapa sumber, disajikan dalam berbagai cara, dan dalam berbagai waktu. Triangulasi data dikenal sebagai proses yang digunakan oleh para akademisi untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini peneliti dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Peneliti memanfaatkan triangulasi sumber untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan informasi dari beberapa

---

<sup>45</sup> Samsu, Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)

sumber. Peneliti akan membandingkan data yang masuk dari berbagai informan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulis membuat sistematika pembahasan yang akan dijelaskan dalam lima bab berikut agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan sistematika penulisan:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai suatu garis besar pokok bab penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan mafaat penelitian.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab kedua ini akan membahas mengenai tinjauan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan banjir beserta hasil penelitiannya. Dan pada bab kedua ini juga membahas mengenai teori-teori dasar serta beberapa acuan kajian teoritik dan pustaka yang memiliki keterkaitan sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

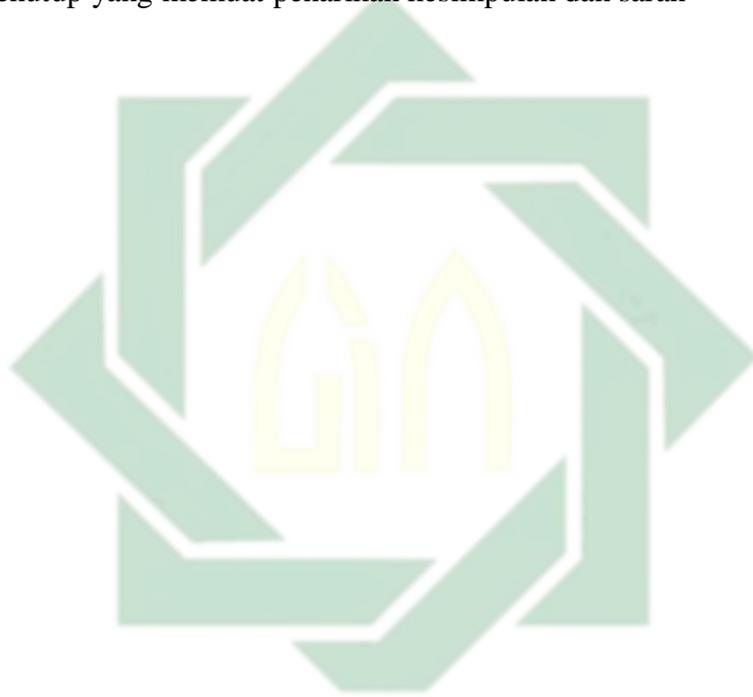
Dalam bab ketiga ini peneliti akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Serta pada bab ini juga menjelaskan mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, dan informan dalam penelitian.

### **BAB IV : PENJAYIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan hasil dari penelitian yang diperoleh selanjutnya hasil data temuan lapangan tersebut akan di analisis menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti dan kemusiaan akan dikonfirmasi dalam bentuk hasil temuan penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini dalam pembahasan ini mengenai penutup yang memuat penarikan kesimpulan dan saran



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kali Lamong Gresik

DAS Kali Lamong melewati 4 kabupaten dan satu Kotamadya, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya. Dari wilayah – wilayah tersebut, wilayah kabupaten Gresik merupakan wilayah yang memiliki persentase terbesar DAS Kali Lamong. Kabupaten Gresik memiliki persentase 44% cakupan DAS Kali Lamong dengan luas 310,12 km<sup>2</sup>, diikuti dengan Kabupaten Lamongan dengan persentase 39% yang memiliki luas 276 km<sup>2</sup>, Kabupaten Mojokerto dengan persentase 11% yang memiliki luas 80,56 km<sup>2</sup> , Kabupaten Jombang dengan persentase 4% yang memiliki luas 26,06 km<sup>2</sup> dan yang terkecil ada pada wilayah Kota Surabaya dengan persentase 3% yang memiliki luas wilayah 18,06 km<sup>2</sup>.<sup>46</sup>

Kondisi topografi berkaitan dengan proses limpasan permukaan, erosi, serta sedimentasi pada DAS Kali Lamong. DAS Kali Lamong bagian hulu merupakan daerah pegunungan dengan topografi bergelombang. Dikelilingi oleh punggung bukit kapur dan tanah lempung, bagian hulu DAS Kali Lamong merupakan lahan subur. Lahan yang subur tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian besar sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Daerah hulu ini terletak pada elevasi 50 hingga 128 meter di atas permukaan air laut.

DAS Kali Lamong bagian tengah meliputi Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Secara umum kondisi topografi yang dilalui aliran Kali Lamong bagian tengah relatif datar. Topografi yang relatif datar ini berakibat lebih jauh pada kondisi genangan air banjir dari sungai. DAS Kali Lamong bagian hilir meliputi 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean,

---

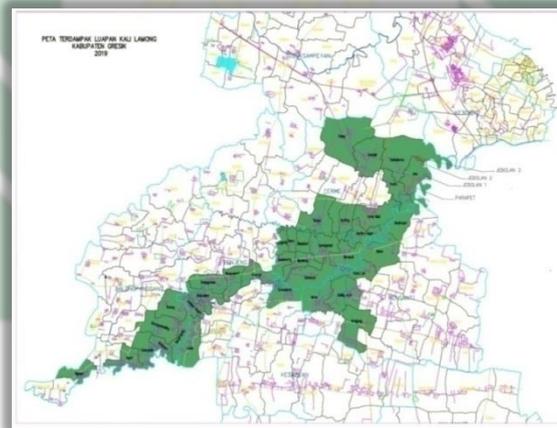
<sup>46</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gresik 2021-2026



m<sup>3</sup>/detik. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi musim kemarau, dimana lingkungan Kali Lamong mengalami kekeringan dengan base flow nol. Akibat kondisi hidrologi tersebut, Sungai Lamong setiap tahun meluap dan menenggelamkan sebagian besar cekungan Kali Lamong di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Di sisi lain, wilayah ini mengalami defisit air pada musim kemarau. Sungai-sungai terputus-putus ditemukan di DAS Kali Lamong. Meskipun Kali Lamong sering mengeluarkan banyak air, sungai ini memiliki karakteristik air yang mengalir pada musim hujan dan mengering pada musim kemarau. Namun besarnya debit ini tidak dapat tersalurkan dengan baik sehingga mengakibatkan air sungai meluap dan banjir setiap tahunnya.

#### **Gambar 4.2**

#### **Peta daerah terdampak banjir kali lamong Gresik**



*Sumber : Bappeda Gresik*

Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) - BPBD Kabupaten Gresik, pada 2 Januari 2020 sebanyak 37 Desa di 5 Kecamatan terdampak Banjir, yaitu Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti dan Kedamean. Banjir pada DAS Kali Lamong diduga akibat kapasitas sungai pada bagian tengah dan hilir DAS yang tidak mampu menampung debit banjir yang melewatinya serta pendangkalan sungai oleh sedimentasi dari hasil erosi.

Selain luapan air sungai Kali Lamong yang melebihi kapasitas tampungan, peristiwa banjir di Kali Lamong juga disebabkan oleh kondisi topografi yang

relatif datar, serta perubahan alih fungsi lahan yang tidak tepat. Selain dari perubahan alih fungsi lahan, tingginya kegiatan manusia yang berhubungan erat dengan dengan perubahan tata guna lahan yang terdapat di hulu sugai yang mana dapat berpengaruh pada laju sedimentasi yang terjadi sungai. Tingginya laju sedimentasi yang terjadi, membuat kemampuan sungai menjadi berkurang sehingga menjadi salah satu dari penyebab banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tahun 2014 banjir di Kali Lamong menyebabkan ribuan rumah terendam banjir serta ratusan hektar sawah dan tambak terendam banjir di 42 desa dari 5 kecamatan serta menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 orang akibat terhanyut arus banjir.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Kebijakan Pemerintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong Gresik**

Banjir yang disebabkan luapan kali lamong telah sangat mensengsarakan warga masyarakat kabupaten Gresik khususnya yang berada di daerah aliran sungai kali lamong. Banjir yang disebabkan luapan kali lamong ini hampir terjadi tiap tahunnya. Bahkan setahun bisa mencapai 3-4 kali.

**Gambar 4.3**

### **Kali Lamong di Desa Gluronploso**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti*

Banjir luapan kali lamong ini sudah menjadi langganan untuk wilayah kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom dan Kedamean. Masyarakat yang berada di wilayah tersebut selalu terdampak karena banjir ini merendam rumah, persawahan dan tambak warga, sebagaimana warga di kecamatan tersebut berprofesi sebagai petani dan pemilik tambak berupa ikan bandeng, nila, udang dan lain lain. Jika terjadi banjir maka lahan persawahan terendam air banjir yang menyebabkan gagal panen sedangkan untuk pemilik tambak jika terjadi banjir maka ikan dan udang yang berada di tambak terbawa arus banjir. Sedangkan untuk daerah atau kecamatan lain yang di Kabupaten Gresik yang tidak teraliri sungai kali lamong maka tidak terkena dampak luapan kali lamong. Seperti contoh nya kecamatan Kebomas, Gresik, Dukun, Driyorejo, Bungah, Manyar, Duduk Sampeyan, Panceng, Sidayu, Ujung Pangkah, Sangkapura, Tambak.

Oleh sebab itu pemerintah kabupaten Gresik sudah seharusnya bergerak cepat untuk penanggulangan banjir kali lamong ini. Program dan kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Kali Lamong merupakan salah satu tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan.<sup>48</sup> Program pemerintah kabupaten Gresik dalam pengendalian banjir sungai Kali Lamong yang saat ini sedang dijalankan adalah pembangunan tanggul Kali Lamong Gresik dan normalisasi aliran kali lamong yang berada di daerah Gresik.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Gresik berkolaborasi dengan beberapa pihak dalam membuat kebijakan program rencana pengendalian banjir kali lamong dengan skala prioritas yang terbagi menjadi tiga rentan waktu. Pihak-pihak yang tergabung dalam program rencana pengendalian kali lamong ini terdiri dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten

---

<sup>48</sup> Peraturan presiden nomer 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik-BangkalanMojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan- Kawasan Bromo-Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan.

Gresik dan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan aliran sungai kali lamong mengalir 3 Kabupaten tersebut dan 1 Kota Madya. Berikut program rencana penanggulangan kali lamong menurut Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) :

#### 1. Jangka Pendek

Normalisasi kali lamong dan anak sungainya. Normalisasi kali lamong ini dilakukan di semua kecamatan atau desa yang berada di aliran sungai kali lamong. Normalisasi kali lamong ini memiliki arti pengerukan, sedimentasi, rehabilitasi badan kali, pembersihan sampah, gulma. Dan yang kedua yaitu konstruksi tanggul parapet. Yaitu pembuatan tanggul parapet di sepanjang bantaran sungai kali lamong. Pembangunan tanggul penahan banjir di Kali Lamong sebagai salah satu upaya pengendalian banjir yang terjadi pada kurun waktu 2010 an hingga 2020 terus menjadi perhatian baik oleh BBWS Bengawan Solo sebagai pengelola utama kali Lamong.

#### 2. Jangka Menengah

Retarding basin atau kolam retensi Jangka Panjang adalah waduk yang menampung jumlah total air pada saat debit sungai tertinggi terjadi dan secara perlahan mengosongkan waduk pada saat debit sungai kembali normal. Secara khusus, kolam retensi akan mengurangi jumlah puncak banjir di sungai, menurunkan risiko limpasan yang dapat menyebabkan tanggul jebol dan menyebabkan luapan sungai.<sup>49</sup> Dalam hal ini kolam retensi di hulu Sungai Lamong yang memiliki total waduk 409692 m<sup>3</sup>. Saluran masuk kolam retensi dirancang dengan saluran pelimpah samping, dan pintu keluaranya berupa pintu pembuangan dengan periode pengurasan kolam selama 3 jam 6 menit. Kolam retensi efektif mengurangi banjir sebesar 11,4%.

---

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Tata Cara Pembuatan Kolam Retensi Dan Polder Dengan Saluran-Saluran Utama. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

### 3. Jangka Panjang

Pembangunan waduk Pedes di Kecamatan Sambeng Lamongan. Di Dusun Pedes, Desa Selorejo, dan Kecamatan Sambeng, Pemerintah Kabupaten Lamongan berniat membangun waduk Lamong. Sungai Lamong akan dibendung oleh Waduk Lamong yang memiliki luas tangkapan air 196,4 km<sup>2</sup>. Volume waduk ini adalah 23,4 juta m<sup>3</sup>. Waduk akan dibangun sebagai bendungan penimbunan tanah tegak dengan inti tanah liat setinggi 20 meter. Sekertaris Daerah Kabupaten Lamongan menilai, waduk ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih 1,56 m<sup>3</sup>/detik serta air pertanian seluas 1.600 hektar.<sup>50</sup>

Manajemen arah kebijakan tersebut dilakukan dengan cara kolaborasi yakni kerjasama dengan semua stakeholder, level pemerintah, swasta, lembaga publik lainnya. Analisis Masterplan yakni sinkonisasi masterplan penanganan, pengendalian dan pengelolaan DAS. Landuse yakni pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan sepanjang DAS. Intervention (Tanggap Bencana) yakni sistem sarana dan prasarana dan SOP tanggap bencana.<sup>51</sup>

Tentu nya program rencana penanganan banjir kali lamong dilakukan tidak hanya berasal dari pemerintah kabupaten Gresik akan tetapi juga berasal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Lamongan dan Kota Surabaya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik melalui visi misi bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuat nawakarsa bupati yakni sembilan program prioritas tematik yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik baru. Program penanggulangan banjir kali lamong Gresik termasuk ke dalam nawakarsa bupati yang ketiga yakni Program Gresik Mapan. Program Gresik Mapan menjadi wewenang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada bidang sumber daya air.

Selain Dinas PUTR Program Gresik mapan dalam penanggulangan banjir kali lamong Gresik juga menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Gresik

---

<sup>50</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2012/05/30/lamongan-bangun-waduk-setinggi-20-meter> Di akses pada Kamis, 09 Maret 2023

<sup>51</sup> Dokumen Paparan pengendalian Banjir Kali lamong milik Bappeda

selama tahun 2022. Dalam hal ini capaian kinerja Komisi III DPRD Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong yakni pengawasan mengenai mengurangi volume banjir karena luapan kali lamong dan mengoptimalkan penanganan kali lamong. Akan tetapi, ada beberapa kontraktor pembangunan infrastruktur yang tidak mampu menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target yang ditentukan. Karena akibat kontraktor tidak mampu memenuhi deadline, penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan, Kali Lamong, jembatan dan lainnya tidak tepat waktu. Tidak hanya jalan, tapi juga lahan pertanian menjadi terganggu.<sup>52</sup>

Pada program Gresik Mapan ini pemerintah kabupaten Gresik berkomitmen dalam pembebasan lahan untuk pembuatan parapet atau tanggul. Pembebasan lahan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2021 sehingga pihak pemerintah pusat melalui BBWS BS berkomitmen untuk mempercepat pembangunan tanggul. Pengerjaan pembangunan tanggul parapet telah dilakukan di Desa Jono dan Tambak Beras Kecamatan Cerme yakni sepanjang 1,3 km pada tahun 2021 kemarin. Pembuatan tanggul ini sudah tuntas dikerjakan karena sudah dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten Gresik. Lalu pada program Gresik mapan ini pemerintah kabupaten Gresik juga melakukan pengelolaan sumber daya air yakni normalisasi kali lamong Gresik.<sup>53</sup>

Meskipun pemerintah kabupaten Gresik sudah membuat Program Gresik Mapan akan tetapi Pemerintah Desa di desa atau kecamatan yang sering terdampak banjir kali lamong tetap berinisiatif sendiri untuk membuat tanggul tanah sebagai penahan banjir kali lamong. Pembuatan tanggul tanah dibuat oleh warga masyarakat desa sendiri dengan anggaran desa setempat. Pembuatan tanggul tanah ini sudah dilakukan sejak dahulu akan tetapi karena sering terkena banjir lama kelamaan tanggul tanah tersebut rusak. Oleh sebab itu, balai besar wilayah sungai bengawan solo berkomitmen untuk mempercepat pembangunan tanggul parapet.

---

<sup>52</sup> Dokumen Laporan Kinerja DPRD Gresik Tahun 2022

<sup>53</sup> <https://gresikkab.go.id/dokumen/pemerintah-kabupaten-gresik> Diakses pada 09 Maret 2023

Bupati meminta dilakukan normalisasi agar sungai kali lamong tidak dangkal dan dapat menampung debit air yang masuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemerintah kabupaten Gresik untuk menanggulangi banjir kali lamong berada di nawakarsa bupati yakni program Gresik Mapan. Program gresik mapan ini terfokus pada normalisasi kali lamong gresik dan pembebasan lahan. Berikut penjelasan mengenai normalisasi dan pembebasan lahan :

### **1. Normalisasi Kali Lamong**

Normalisasi merupakan sebuah kegiatan untuk mengembalikan fungsi penampung sungai yakni dengan menggali sedimentasi agar sungai menjadi lebih dalam, sehingga aliran air sungai semakin lancar serta dapat berfungsi sebagai pengendali banjir.<sup>54</sup> Dalam hal ini normalisasi kali lamong berupa pengerukan sedimentasi, rehabilitasi badan kali lamong seperti pelebaran dan pembersihan sampah atau gulma. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Gresik melakukan Normalisasi di sepanjang bantaran sungai kali lamong yang berada di Daerah Gresik yaitu di Kecamatan Balongpanggung, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme.

Normalisasi ini mulai dikerjakan sedari hulu kali lamong yang ada di daerah gresik yaitu di kecamatan Balongpanggung lalu terus berjalan mundur hingga sampai ke hilir nya yaitu di kecamatan Cerme. Normalisasi berupa pengerukan ini menggunakan alat berat yaitu bego milik Dinas PUTR kab Gresik. Sumber daya manusia yang mengerjakan pengerukan ini juga dari dinas PUTR. Akan tetapi dinas PUTR juga menunjuk beberapa warga desa setempat sebagai pengawas normalisasi kali lamong ini. Pengawas pengerukan kali lamong ini di pilih dari

---

<sup>54</sup><https://dipusda.bojonegorokab.go.id/berita/baca/20#:~:text=Normalisasi%20adalah%20untuk%20mengembalikan%20fungsi,berfungsi%20juga%20sebagai%20pengendali%20banjir.> Di akses pada 08 Januari 2023

warga desa sendiri di karenakan warga desa tersebut lah yang dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kondisi kali lamong.

Normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran kali lamong ini dilakukan setiap hari senin sampai sabtu, akan tetapi ketika turun hujan maka normalisasi ini di berhentikan sementara. Karna hujan yang turun membuat debit air kali lamong bertambah sehingga tidak bisa dilanjutkan pengerukan nya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka saat ini sedang dilakukan normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran kali lamong di desa gluronploso. Sosialisasi mengenai normalisasi kali lamong ini juga sudah dilakukan pada bulan agustus tahun 2021.

Saat ini normalisasi dilakukan di desa gluronploso. Warga desa di sosialisasikan mengenai jangka pendek penanganan kali lamong di desa gluronploso berupa pengerukan dan pelebaran kali lamong. Sedangkan jangka panjang nya berupa pembuatan tanggul. Warga desa di sosialisasikan akan ada pembebasan lahan untuk pembuatan tanggul parapet di sekitar aliran sungai kali lamong akan tetapi tidak sekarang melainkan bertahap, saat ini pembebasan lahan masih berada di kecamatan cerme.

#### **Gambar 4.4**

#### **Normalisasi Kali Lamong di Desa Gluronploso**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti*

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka kegiatan normalisasi sebagian besar dialokasikan melalui dana APBD dan sebagian area ada yang dikerjakan oleh paguyuban pengusaha di masing-masing Kecamatan yang terdapat aliran Kali Lamong. Pemerintah Kabupaten Gresik, mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar dari anggaran APBD 2022 untuk pengerukan Kali Lamong.<sup>55</sup> Pengerjaannya pun disegerakan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah tersebut. Ketika Kali Lamong dikeruk total sepanjang 7,1 kilometer pada 2021, asosiasi pengusaha di setiap kecamatan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan memberikan bantuan sepanjang 1,5 kilometer itu.

Normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran kali lamong menurut warga desa masyarakat cukup mengurangi resiko banjir kali lamong. Warga masyarakat merasakan dampaknya yaitu yang biasanya banjir air nya lama surut hingga sampai seminggu an baru surut. Sedangkan saat ini ketika banjir kali lamong hanya sampai 3 hari saja air sudah surut. Akan tetapi menurut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka peneliti menemukan terdapat dampak negatif dari pengerukan kali lamong ini. Pengerukan dilakukan dengan cara memperdalam daya tampung sungai atau kali yaitu mengeruk tanah atau beberapa sampah yang berada di sungai. Pengerukan yang dilakukan oleh pekerja yang dibawah naunangan dinas PUTR ini tidak mempedulikan mengenai kelestarian lingkungan hidup yang berada di pinggiran kali lamong.

Pengerukan dilakukan yaitu berupa mengeruk atau mengambil tanah dan sampah yang berada di kali lamong lalu di tempatkan di pinggiran kali lamong sehingga membentuk gundukan atau tanggul tanah alami. Sayangnya pekerja ini tidak memilah mengenai sampah dan tanah nya. Mereka langsung mencampurkan jadi satu antara tanah dan sampah sehingga membentuk gundukan atau tanggul tanah alami. Hal ini jika dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang akan dapat merusak

---

<sup>55</sup> Dokumen Paparan Pengendalian Banjir Kali Lamong milik Bappeda kabupaten Gresik

kesuburan tanah di pinggiran kali lamong di karenakan sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah, sampah plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari. Sehingga jika dilihat dalam jangka panjang banjir bisa saja sering terjadi di karenakan tanah nya tidak subur dan kuat karena terdapat sampah plastik didalamnya. Dan juga ketika ada sampah plastik di dalam tanah maka akan sulit ditumbuhi tanaman.

## **2. Pembebasan Lahan untuk Pembuatan Tanggul**

Cara pengendalian banjir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010–2030, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.8 Tahun 2011 Tentang Jangka Pendek dan Panjang upaya pengendalian banjir jangka panjang, khususnya dengan membangun tanggul.<sup>56</sup>

Pada tahun 2011 pihak pemerintahan provinsi sudah melakukan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan yang nanti nya akan dibuat tanggul. Pemerintah provinsi jatim menggunakan drone atau pesawat tanpa awak untuk memetakan lahan yang akan digunakan untuk revitalisasi dan normalisasi kali lamong. Penggunaan drone ini dilakukan agar dapat menjadi acuan mengenai penetapan lokasi untuk pembebasan lahan agar menjadi lebih akurat. Akan tetapi, ketika survey lapangan mendapatkan fakta bahwa rumah yang berada di bantaran kali lamong adalah milik warga tersebut. Hal ini dibenarkan dengan adanya bukti kepemilikan lahan, sehingga pemilik lahan dan rumah tersebut meminta dibebaskan lahannya dengan ganti rugi. Terkait pembebasan tanah, permasalahan pada nilai appraisal, dimana harga per meter lahan mestinya hanya Rp 35 ribu. Tapi warga minta Rp 100 ribu per meter. Karena

---

<sup>56</sup> Pasal 16 Perda Kabupaten Gresik No.8/2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Gresik tahun 2010-2030

tingginya harga yang diminta itulah, pembebasan lahan untuk Kali Lamong menjadi berlarut-larut.<sup>57</sup>

Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan tanggul penahan banjir di Kali Lamong adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan struktur tanggul, baik tanggul tanah maupun tanggul berupa parapet maupun berupa CCSP. Permasalahan tanah disempadan Kali Lamong memerlukan sinergi yang baik dalam hal pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini untuk proses pembangunan tanggul penahan banjir.

**Gambar 4.5**  
**Tanggul Parapet di Desa Jono**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti*

Saat ini sudah dilakukan pengadaan tanah atau pembebasan lahan di kecamatan cerme yakni sebagian di desa jono dan sebagian di desa tambak beras. Sehingga pihak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) sudah membuat tanggul parapet di sebagian desa jono dan desa tambak beras. Pemerintah kabupaten Gresik sebelumnya sudah melakukan sosialisasi mengenai pengadaan lahan dengan cara

---

<sup>57</sup> <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/43657> Diakses pada 02 Maret 2023

mengganti rugi lahan persawahan, tambak, rumah warga yang berada di bantaran sungai kali lamong untuk dibuatkan tanggul oleh BBWSBS dan masyarakat juga setuju di karenakan mayaroritas masyarakat nya berprofesi sebagai petani dan pemilik tambak ikan.

Besarnya dana yang di butuhkan untuk Penyelenggaraan Pengadaan Tanah atau pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatan ini adalah untuk pekerjaan Tanggul dan Kolam Retensi Kali Lamong Kabupaten Gresik adalah sebesar Rp. 795.633.716.185,- (= (luas kebutuhan x harga tanah)+ nilai tanaman+ nilai bangunan+nilai non fisik lainnya/makam dsb). Kebutuhan dana tersebut di atas ditambah biaya perencanaan pengadaan tanah yg dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.297.100,000,- , persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah yang dianggarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebesar Rp. 80.044.800.000,- .Luas kebutuhan tanah keseluruhan yang diperlukan adalah 2.827.841,92 m<sup>2</sup> atau 282,78 Ha dan di programkan selama 5 tahun dapat terselesaikan tahap demi tahap pertahun.<sup>58</sup>

Pada tahun 2022 pemerintah kabupaten Gresik telah menyisihkan sekitar Rp. 35 juta untuk pembangunan jamban di Kali Lamong. Pertimbangkan untuk menggunakan penanggulangan dan reservoir sebagai lokasi pemompaan udara. Sebaliknya, BBWS mematok kebutuhan dana minimal Rp 100 juta untuk penyelesaian proyek pekerjaan tanggul dan waduk Kali Lamong tahun 2023 (kolam retensi). Pemkab Gresik juga menginformasikan kepada pemerintah bahwa perkiraan kebutuhan pembangunan sebesar Rp. Bahan 170 juta. Karena Gresik terletak di daerah dengan panjang aliran yang melebihi sekitar 50 km maka daerah Gresik menyerap dana begitu besar.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik tahun 2021-2026

<sup>59</sup> <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php/tag/kali-lamong/> diakses pada 09 Maret 2023

Pekerjaan mengenai pembebasan lahan di bantaran kali lamong dan pembangunan tanggul akan dilakukan secara bertahap. Saat ini pembebasan lahan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu dimulai di daerah hilir yaitu daerah kecamatan Cerme. Program antisipasi banjir BBWS Bengawan Solo telah membangun kurang lebih 1,5 kilometer tanggul parapet di wilayah Kecamatan Cerme. Sehingga beberapa desa di kecamatan Cerme sudah dibebaskan lahannya yakni Desa Cerme, Tambak Beras, Jono dan Pandu. Lalu pada tahun ini BBWS Bengawan Solo sudah menentukan beberapa titik yang akan di buat tanggul dikarena banjir luapan kali lamong dapat berpotensi masuk ke desa yakni di Kecamatan Balaongpanggung. Oleh sebab itu saat ini secara bertahap pemerintah kabupaten Gresik melakukan sosialisasi mengenai diadakannya pembebasan lahan di Kecamatan Balongpanggung

Hasil survey sosial ekonomi pada masyarakat di 6 kecamatan dan 30 desa menunjukkan antusias yang tinggi terhadap penerimaan rencana pembangunan tanggul penahan banjir. Mayoritas penduduk yang domisili di sekitar daerah aliran sungai Kali Lamong adalah Petani dengan prosentasi sekitar 42%, menyusul perangkat desa 18,10% dan Karyawan Swasta 12,25%. Masyarakat sekitar Kali Lamong menyatakan sangat setuju untuk rencana pembangunan tanggul penahan banjir dengan prosentasi 71,85% dan setuju dengan prosentasi 24,86%.<sup>60</sup>

Struktur tanggul penahan banjir merupakan salah satu kegiatan pengendalian banjir dan upaya memperbaiki alur sungai yang bertujuan untuk mengurangi resiko terhadap meluapnya air dari sungai ke wilayah daratan. Bentuk dan tinggi suatu tanggul direncanakan berdasarkan pertimbangan teknis melalui prosedur standar yang sudah berlaku, dimana lebar dan tinggi tanggul sudah merupakan hasil perencanaan yang matang. Bentuk dan tinggi tanggul serta material tanggul penahan banjir di Kali

---

<sup>60</sup>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik Tahun 2021-2026

Lamong mengikuti desain dari pihak BBWS Bengawan Solo sebagai pengelola utama Kali Lamong.

Detail desain tanggul penganggulangan banjir Kali Lamong sudah selesai pada tahun 2012 dan akan dilakukan review pada tahun 2021. Lokasi Rencana Pembangunan tanggul penahan banjir berada pada tepi kanan kiri Kali Lamong berjarak bervariasi 5 meter sampai dengan 15 meter bergantung kondisi pada masing-masing segmen. Pekerjaan pengukuran lahan bidang dilakukan untuk mendapatkan luasan masing-masing bidang yang dilakukan pada 30 Desa yang berada pada wilayah Kabupaten Gresik meliputi 6 Kecamatan yakni; Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Mengganti, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kebomas. Untuk membuat tanggul untuk program pengendalian banjir di DAS Kali Lamong, diperlukan fasilitas dan peralatan konstruksi. Namun karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memasukkan program pembangunan ini dalam proyek lelang maka pemenang lelang yang berhasil ialah PT. Marinda Utamakarya Subur yang menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pembangunan tanggul.<sup>61</sup>

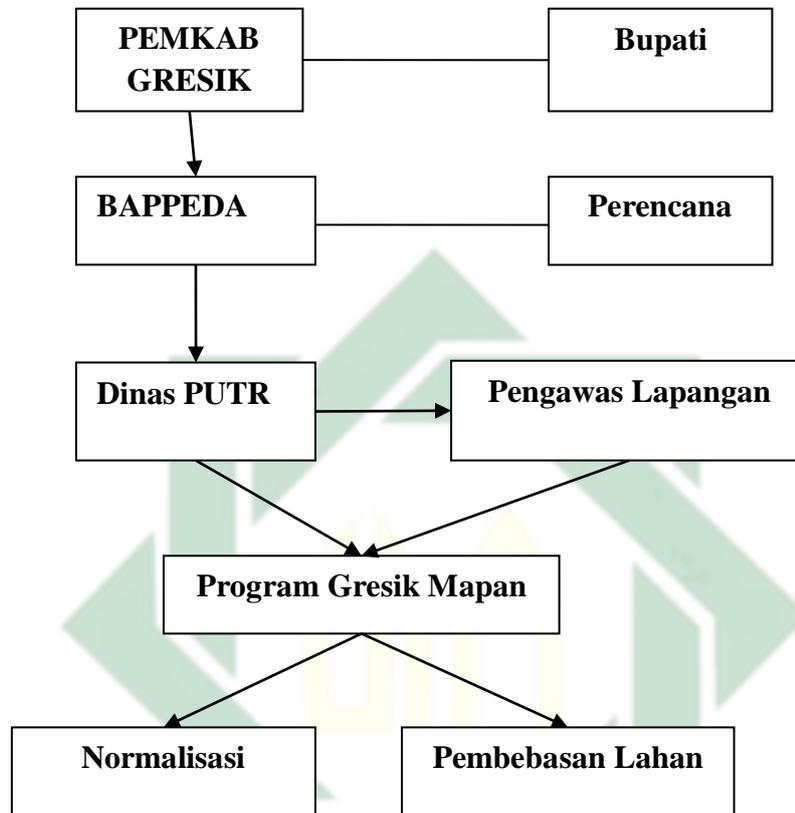
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>61</sup> Ach. Apriyanto, Ahmad Rusydan Fakhri, Iradhad Taqwa Sihidi “Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik” JPAP Vol 8 No 2 Diterbitkan: 17-01-2023

### Bagan 4.1

#### Struktur Birokrasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong Gresik



Sumber : Peneliti

Pemerintah kabupaten Gresik dalam hal ini Bupati Gresik membuat nawakarsa yakni 9 nafas pembangunan menuju Gresik Baru. Nawa karsa mengenai penanganan banjir kali lamong terletak di sebuah program bupati yakni Gresik Mapan. Program Gresik mapan berkomitmen pada normalisasi kali lamong yakni berupa pengerukan, pelebaran dan memperdalam kali. Selain normalisasi kali lamong program Gresik Mapan juga berkomitmen mengenai pembebasan lahan yang nanti nya akan dibuatkan tanggul oleh BBWS BS. Kemudian program Gresik mapan tersebut diturunkan kepada Bappeda Gresik sebagai perencana dan sebagai memberikan anggaran dana untuk program ini. Kemudian Program Gresik Mapan ini menjadi wewenang kepada Dinas PUTR bagian Sumber Daya Air. Disini Dinas PUTR berperan sebagai eksekutornya yakni penyelenggara Program

Gresik Mapan untuk melancarkan program ini Dinas PUTR menunjuk pengawas lapangan di masing-masing desa untuk mengawasi pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan di masing-masing desa.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Data dengan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III**

Tahap selanjutnya yaitu analisis data yang memiliki arti sebuah kegiatan yang membuat daftar pertanyaan lalu pengumpulan data serta analisis data. Yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh informan yang hendak di wawancarai. Berikut peneliti akan paparkan mengenai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan politik kebijakan pemerintah Kab Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh peneliti di antara nya : Ir. Moh. Hilmi, MT selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Gresik. Ubaidillah, ST, MT selaku kepala bagian sumber daya air Dinas PUTR Gresik. Suyono selaku sekretaris Desa Jono. Muhammad Zainuri selaku staff kecamatan Benjeng bagian pembangunan. Pak Kemadi selaku pengawas lapangan proyek normalisasi di desa gluroploso. Maria Ulfa dan Sugiharti sebagai warga desa jono. Sujina, Suyitno, Prianto sebagai warga desa gluronploso benjeng.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kab Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong. Pemilihan konsep teori implementasi edward II ini berdasarkan keserasian dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini.

#### **1. Komunikasi**

Faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi. Karena menurut George C. Edward III komunikasi memiliki

pengaruh yang sangat penting terhadap berhasilnya dari suatu tujuan diterapkannya suatu kebijakan. Disini komunikasi antara pihak perencana kebijakan yaitu Bappeda dan Dinas PUTR selaku pelaksana dan juga pihak pengawas lapangan sangat mempengaruhi dalam berhasilnya kebijakan pemerintah kab. Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong. Dalam faktor komunikasi ini terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan faktor komunikasi pada teori implementasi oleh Edward :

a. Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi agar tidak terjadi *misscommunication*. Disini pihak Bappeda selalu berkomunikasi dengan eksekutornya yaitu Dinas PUTR mengenai perkembangan penanggulangan banjir kali lamong. Berikut yang disampaikan oleh bapak Ir. Moh Hilmi, MT selaku perencana ahli muda Bappeda Gresik saat peneliti mewawancarai mengenai penyaluran informasi :

“Jadi peran Bappeda disini hanya sebagai perencana kemudian eksekutornya itu dinas PUTR. Jadi saya (pihak Bappeda) hanya menerima laporan dan yang menyerahkan hasil laporan mengenai perkembangan penanggulangan banjir kali lamong seperti normalisasi, pembebasan lahan untuk pembuatan tanggul itu Dinas PUTR.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa peran Bappeda dalam penanggulangan banjir kali lamong hanya sebagai perencana sedangkan untuk eksekutornya ialah Dinas PUTR. Jadi Dinas PUTR selalu menyerahkan hasil laporan mengenai perkembangan penanggulangan banjir kali lamong kepada Bappeda. Dalam hal ini peneliti meminta tanggapan kepada bapak Ubaidillah, ST,MT. selaku kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR mengenai penyaluran informasi antara pihak Bappeda dengan Dinas PUTR :

---

<sup>62</sup> Ir. Moh Hilmi, MT (Perencana ahli muda Bappeda Gresik) wawancara pada tanggal 05 januari 2023 jam 08.20 WIB

“Dinas PUTR bagian sumber daya air ini sebagai eksekutor mengenai penanggulangan banjir kali lamong sedangkan Bappeda sebagai perencana nya. Pada saat pengerjaan proyek penanggulangan banjir kali lamong kami akan melaporkan ke bappeda mengenai perkembangan proyek tersebut”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pak Ubaidillah selaku Kabag Sumber Daya Air Dinas PUTR membenarkan tanggapan dari Pak Hilmi bahwa Bappeda hanya menerima laporan perkembangan penanggulangan banjir kali lamong sedangkan Dinas PUTR yang menyerahkan hasil laporan penanggulangan banjir kali lamong. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tidak terjadi *misscomunacation* antara Bappeda sebagai perencana dengan Dinas PUTR sebagai pelaksana nya dikarenakan Dinas PUTR selalu memberikan laporan mengenai perkembangan penanggulangan banjir kali lamong ke Bappeda.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan penyaluran komunikasi secara jelas maksud nya ialah tidak ambigu, atau membingungkan. Penyaluran komunikasi harus lah jelas agar pelaksana, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas mengetahui mengenai maksud, tujuan dari kebijakan tersebut.

Pada aspek kejelasan ini Pemkab Gresik melakukan komunikasi dengan cara sosialisasi ke masyarakat mengenai normalisasi kali lamong yang saat ini dikerjakan di desa gluronploso dan pembebasan lahan di desa jono cerme. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai proyek program kebijakan pemerintah kab Gresik dalam menanggulangi banjir kali lamong yang berada di desa nya. Kemudian peneliti mewawancarai staff kecamatan benjeng yakni Bapak Muhamad Zainuri mengenai kejelasan penyaluran informasi untuk normalisasi kali lamong yang saat ini dilakukan di kecamatan Benjeng :

---

<sup>63</sup> Ubaidilillah, ST, MT (Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 Januari 2023 jam 09.00

“Mulai normalisasi itu tahun 2022 dan sebelum normalisasi juga sudah diadakan sosialisasi per desa. Sosialisasi mengenai akan dilakukan normalisasi kali lamong, terus masyarakatnya juga setuju mba karena di kecamatan benjeng kan mayoritas bertani. Ya memang sih masih banjir meskipun sudah normalisasi akan tetapi intensitas air banjir nya itu cepat surut, biasanya samapai seminggu air dapat surut tapi setelah dilakukan normalisasi cukup 3 hari saja air sudah mulai surut, intinya tidak separah sebelumnya”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik sudah melakukan sosialisasi mengenai normalisasi di kecamatan Benjeng sebelum dilakukannya pengerjaan normalisasi kali lamong. Dalam hal ini peneliti meminta tanggapan kepada masyarakat desa gluronploso kecamatan Benjeng mengenai penyaluran informasi sosialisasi terkait normalisasi kali lamong. Alasan peneliti memilih mewawancarai masyarakat desa gluronploso dikarenakan saat ini normalisasi kali lamong berada di desa gluronploso, berikut hasil wawancaranya :

“Sudah dilakukan sosialisasi di kelurahan sebelum pengerjaan proyek normalisasi, akan tetapi untuk saat ini belum pembebasan lahan namun katanya akan dibuatkan tanggul juga secara bertahap. Menurut saya semenjak adanya normalisasi ini cukup meringankan beban warga mbak. Karena biasanya banjir itu sampai masuk ke dalam rumah akan tetapi setelah normalisasi tidak sampai masuk ke dalam rumah hanya ke halaman rumah aja tapi kalo sawah ya masih terendam. ”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga desa Gluronploso dapat dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik sudah melakukan sosialisasi di kecamatan Benjeng mengenai normalisasi kali lamong. Sedangkan untuk pemebebasan lahan dilakukan di Desa Jono. Peneliti mewawancarai sekeretaris Desa Jono terkait kejelasan penyaluran informasi kepada masyarakat mengenai pemebeasan lahan, berikut hasil wawancaranya :

---

<sup>64</sup> Muhammad Zainuri (Staff Kecamatan Benjeng bidang Pembangunan) wawancara pada tanggal 06 Januari 2023 jam 13.15

<sup>65</sup> Sujina (warga desa Gluronploso) wawancara pada tanggal 11 Januari 2023 jam 11.00

“Sudah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2021 pada tahap pertama lalu tahap kedua di tahun 2022, sosialisasi itu sudah dilakukan di balai desa jono, sosialisasi ini dilaksanakan sebelum pembebasan lahan di bantaran sungai. Jadi di bantaran sungai kan masih ada rumah warga nah itu rumah nya di beli oleh pemerintah terus di bongkar untuk pembuatan tanggul”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah kabupaten Gresik sudah melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan di Desa Jono sejak tahun 2021. Dalam hal ini peneliti juga meminta tanggapan kepada masyarakat desa jono mengenai pembebasan lahan di desa jono, berikut hasil wawancaranya :

“Sosialisasi dilakukan sejak lama mengenai pembuatan tanggul, makanya di pinggir kali lamong itu kan masih ada rumah warga lalu ada tambak juga nah itu lahan rumah dan tambak nya di beli pemerintah. Kebetulan saya pemilik tambak di beli pemerintah akan tetapi luas lahan tambak ga semua nya di beli sama pemerintah cuman separuh dari luas nya aja yang dibeli, dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan lahan untuk pembuatan tanggul pokoknya butuhnya berapa gitu untuk dibuat tanggul nanti dibeli sama pemerintah”.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan warga desa jono maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Gresik sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa jono mengenai pembebasan lahan di desa nya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada warga desa Gluronploso dan warga desa jono maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kejelasan penyaluran informasi yakni sosialisasi terkait normalisasi kali lamong di desa gluronploso dan pembebasan lahan di desa jono sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebelum pengerjaan proyeknya.

c. Konsistensi

Konsistensi sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur atau membingungkan pelaksana kebijakan. Sehingga

---

<sup>66</sup> Suyono (sekretaris Desa Jono) wawancara pada tanggal 06 januari 2023 jam 09.50

<sup>67</sup> Sugiharti (warga Desa Jono) wawancara pada tanggal 06 januari 2023 jam 11.10

penyaluran komunikasi haruslah konsisten. Pada hal ini konsistensi dilakukan Dinas PUTR dengan pelaksana proyek normalisasi kali lamong di desa Gluronploso dan juga dengan sekretaris Desa Jono untuk pembebasan lahan, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR mengenai konsistensi penyaluran informasi terkait normalisasi kali lamong di desa gluronploso :

“Yang mengerjakan normalisasi nya seperti pengerukan, pelebaran dan memeperdalam kali itu orang dinas sendiri yang mengerjakan. akan tetapi Dinas PUTR juga menunjuk warga desa setempat sebagai pengawas lapangan, yang nanti nya pengawas lapangan tersebut melaporkan ke Dinas PUTR melalui wa saja”<sup>68</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya konsistensi penyaluran informasi terkait normalisasi kali lamong sudah dilakukan oleh dinas PUTR melalui pengawas lapangan desa gluronploso yakni dengan cara pengawas lapangan melaporkan kegiatan normalisasi secara konsisten setiap hari ke dinas PUTR melalui whatsapp. Kemudian peneliti meminta tanggapan kepada pengawas lapangan desa gluronploso terkait konsistensi penyaluran informasi antara Dinas PUTR dengan pengawas lapangan, berikut hasil wawancaranya :

“Saya yang terjun lapangan secara langsung mengenai normalisasi di kali lamong ini, setiap hari dilakukan pengerukan akan tetapi menyesuaikan cuaca jika sedang hujan ya tidak bisa pengerjaan normalisasi. Setiap hari saya menginformasikan perkembangan normalisasi kali lamong ini ke dinas PU melalui whatsapp saya foto kan saja kegiatan normalisasi kalo lamong ini terkadang juga Dinas PU ngecek secara langsung datang ke lokasi normalisasi”<sup>69</sup>

Berdasarkan tanggapan dari pengawas lapangan desa gluronploso maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya penyaluran informasi sudah dilakukan secara konsisten oleh pengawas lapangan desa gluronploso kepada dinas PUTR yakni dengan cara pengawas lapangan

---

<sup>68</sup> Ubaidillah, ST,MT (Kepala Bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 Januari jam 09.00

<sup>69</sup> Kemadi (pengawas lapangan normalisasi kali lamong di desa gluronploso) wawancara pada tanggal 11 januari 2023 jam 12.00

memfotokan kegiatan normalisasi kali Imaong dan mengirimkannya ke Dinas PUTR secara konsisten setiap hari. Konsistensi juga dilakukan oleh Dinas PUTR saat melakukan pembebasan lahan di desa Jono, dalam hal ini Dinas PUTR berkoordinasi dengan sekretaris desa jono mengenai pembebasan lahan di desa jono untuk pembuatan tanggul. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris Desa jono mengenai konsistensi penyaluran informasi terkait pembebasan lahan di Desa Jono :

“Pembuatan tanggul merupakan tanggung jawab BBWS Bengawan Solo, sedangkan untuk pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gresik, saya sebagai sekretaris desa jono berkoordinasi dengan dinas PUTR mengenai pembebasan lahan, jadi BBWS Bengawan Solo sudah menetapkan lahan mana yang akan dibuatkan tanggul kemudian Pemkab Gresik yang melakukan pembebasan lahan, nanti nya saya ikut mengawasi pembuatan tanggul nya sudah dilakukan di lahan yang sudah dibebaskan tidak, kemudian saya melaporkannya ke dinas PUTR”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekretaris desa jono secara konsisten melaporkan mengenai pembebasan lahan di desa jono kepada Dinas PUTR. Setelah itu peneliti meminta tanggapan kepada Dinas PUTR terkait konsistensi penyaluran informasi mengenai pembebasan lahan yang ada di Desa Jono. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepa Dinas PUTR:

“Setiap sekretaris desa yang berada di desa yang sudah di bebaskan lahannya akan melaporkan ke saya bagaimana apakah sudah benar lokasi tempat pembuatan tanggul nya, apakah dikerjakan di lahan yang sudah dibebaskan atau tidak karena takutnya dikerjakan di lahan yang salah oleh sebab itu dinas PUPR membentuk pengawas lapangan yang berasal dari sekretaris desa dan masyarakat desa.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konsistensi peyaluran komunikasi untuk pembebasan lahan sudah dilakukan dengan baik yakni sekretaris desa jono secara konsisten

---

<sup>70</sup> Suyono (sekretaris Desa Jono) wawancara pada tanggal 06 januari 2023 jam 09.50

<sup>71</sup>Ubaidillah, ST, MT (kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 januari 2023 jam 09.00

melaporkan mengenai pembebasan lahan yang ada di desa jono kepada Dinas PUTR. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pak Kemadi sebagai pelaksana lapangan normalisasi kali lamong di desa Gluronploso ini menginformasikan serta memfotokan kegiatan pengerukan kali lamong setiap hari secara konsisten ke dinas PU melalui media whatsapp. Untuk pembebasan lahan Dinas PUTR berkoordinasi dengan sekretaris desa jono. Sekretaris desa jono akan memberikan laporan secara konsisten mengenai proses pembuatan tanggul di desa jono yang lahan nya sudah di bebaskan oleh Pemerintah kabupaten Gresik.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam variabel komunikasi transmisi tidak terdapat misscomuncation antara pihak Bappeda dengan Dinas PUTR dikarenakan Dinas PUTR selalu memberikan laporan mengenai perkembangan penanggulangan banjir kali lamong ke Bappeda. Untuk variabel kejelasan pemerintah kabupaten Gresik sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya normalisasi dan pembebasan lahan di masing-masing desa. Dan yang terakhir mengenai konsisten yakni Dinas PUTR dengan pengawas lapangan dan sekretaris desa sudah melakukan konsisten mengenai memberikan laporan perkembangan normalisasi dan pembebasan lahan kepada Dinas PUTR kemudian Dinas PUTR juga secara berkala mengecek mengenai perkembangan normalisasi dan pembebasan lahan secara langsung ke lokasi.

## **2. Sumberdaya**

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward menyebutkan bahwa sumber daya terbagi menjadi empat aspek yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan faktor sumberdaya pada teori implentasi oleh Edward :

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya paling penting dalam implementasi dari kebijakan. Dalam hal ini sumber daya manusia pada normalisasi kali lamong haruslah yang mumpuni dan memadai di bidangnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara ke kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR mengenai normalisasi kali lamong yang berada di desa Gluronploso, berikut hasil wawancaranya yang dilakukan peneliti ke Dinas PUTR :

“Sumberdaya manusia nya untuk normalisasi kali lamong itu orang dinas sendiri mbak, akan tetapi Dinas PUTR juga menunjuk orang desa nya sebagai pengawas lapangan soalnya kan yang mengerti secara langsung mengenai kondisi kali lamong ketika musim penghujan atau musim kemarau kan orang desa nya itu yang teraliri aliran sungai kali lamong”<sup>72</sup>

Dapat disimpulkan dari wawancara peneliti dengan dinas PUTR bahwa sumberdaya manusia dalam normalisasi kali lamong ini ialah orang dinas sendiri dan Dinas PUTR menunjuk pengawas lapangan dari desa gluronploso. Dalam hal ini peneliti meminta tanggapan kepada pelaksana lapangan di desa gluronploso sebagai sumberdaya manusia nya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan desa gluronploso terkait sumberdaya manusia untuk normalisasi kali lamong di desa gluronploso :

“Saya yang di tunjuk langsung oleh Dinas PU mba untuk mengkoordinir, mengawasi pengerukan kali lamong ini, dari desa ini di tunjuk 7 orang termasuk saya, kenapa kok saya yang di tunjuk mbak sama dinas PU karena saya warga asli desa sini, dimana saya mengetahui secara langsung mengenai keadaan kali lamong. Saat ini pengerukannya kan di desa gluronploso nah nanti kalo pengerukannya ganti misal di desa tambakberas ya ganti lagi orang yang mengkoordinir dan mengawasinya ya dari orang dari desa tambakberas sendiri”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ubaidillah, ST, MT (kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 januari 2023 jam 09.00

<sup>73</sup> Kemadi (pengawas lapangan normalisasi kali lamong di desa Gluronploso) wawancara pada tanggal 11 januari 2023 jam 12.00

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan desa gluronploso dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia untuk normalisasi kali lamong ialah dari orang dinas sendiri dan juga pengawas lapangan desa gluronploso yang ditunjuk langsung oleh Dinas PUTR. Sedangkan untuk pembebasan lahan di Desa jono dilakukan oleh dinas PUTR, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris desa Jono terkait sumberdaya manusia untuk pembebasan lahan di desa jono :

“Di sekitar kali lamong itu masih terdapat rumah dan tambak warga. Kemudian Pemerintah Kabupaten Gresik membebasan lahan tersebut dengan cara membeli lahan yang disekitar kali lamong. Untuk pengerjaan pembongkaran rumah dan tambak itu berasal dari orang Dinas PUTR, sedangkan untuk pembuatan tanggul nya itu proyek dari BBWS Bengawan Solo mba”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Jono bahwasanya sumber daya manusia untuk pembebasan lahan ialah orang Dinas PUTR dan untuk pengerjaan tanggul nya dikerjakan oleh BBWS BS. Kemudian peneliti meminta tanggapan kepada Dinas PUTR mengenai sumber daya manusia nya dalam pembebasan lahan yang ada di Desa Jono, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinas PUTR :

“Rumah dan tambak warga desa yang berada disekitar kali lamong dibebaskan lahannya oleh pemerintah kabupaten Gresik. Untuk pembongkaran rumah yang sudah di ganti rugi sama Pemkab Gresik memang dari Dinas PUTR, sedangkan untuk pembuatan tanggul nya di kerjakan oleh PT. Marinda Utamakarya Subur sebagai pemenang lelang”.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas PUTR sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sumberdaya manusia untuk pembebasan lahan ialah orang dinas PUTR sedangkan untuk

---

<sup>74</sup> Suyono (Sekretaris Desa Jono) wawancara pada tanggal 06 Januari 2023 jam 09.50 WIB

<sup>75</sup> Ubaidillah, ST, MT. (Kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR) pada tanggal 11 januari 2023 jam 09.00

pembuatan tanggul dikerjakan oleh PT. Marinda Utamakarya Subur sebagai pemenang lelang.

Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai sumber daya manusia untuk normalisasi kali lamong ini sudah mumpuni dan memadai karena sumberdaya manusia nya diambil dari warga desa setempat sebagai pengawas lapangan dikarenakan warga desa setempat lah yang lebih mengetahui mengenai keadaan sungai kali lamong sedangkan untuk pengerjaan normalisasi dilakukan oleh orang yang dibawah naungan Dinas PUTR. Untuk pembebasan lahan sumber daya manusia nya dilakukan oleh Dinas PUTR sedangkan untuk pembuatan tanggul dikerjakan oleh PT. Marinda Utamakarya Subur sebagai pemenang lelang.

b. Sumberdaya Anggaran

Sumberdaya anggaran juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena jika anggarannya terbatas maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun ikut terbatas. Terbatasnya sumberdaya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena program tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bappeda mengenai anggaran untuk pembuatan tanggul dan normalisasi kali lamong, berikut hasil wawancara nya :

“Anggaran untuk normalisasi berasal dari APBD Gresik mba tahun lalu 2022 itu sekitar 5 miliar, sedangkan untuk pembuatan tanggul itu dari pemerintah pusat sekitar 1 triliun an, nanti konfirmasi lagi lebih jelasnya ke bidang sumber daya air dinas PUTR mba”<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bappeda maka dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk normalisasi jumlahnya 5 M berasal dari APBD Gresik dan untuk pembuatan tanggul jumlahnya 1 T yang berasal dari pemerintah pusat. Karena hal ini peneliti meminta tanggapan kepada Kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR terkait

---

<sup>76</sup> Ir, Moh Hilmi MT (Perencana Ahli Muda Bappeda Gresik) wawancara pada tanggal 5 Januari 2023 jam 08.20 WIB

sumberdaya anggaran untuk normalisasi kali lamong dan pembebasan lahan, berikut hasil wawancaranya :

“Secara global total anggaran jika jangka pendek untuk bikin tanggul secara keseluruhan dari Lamongan, Mojokerto sampai Gresik itu butuh sekitar 1 triliun. Sedangkan untuk kolam tampung jangka menengah itu kebutuhan anggarannya sekitar 300 miliar. Kemudian pada jangka panjang itu bikin waduk itu juga butuh anggaran 1 triliun. Jadi total itu butuh anggaran sekitar 2,3 T dana, sedangkan untuk pembebasan lahan itu anggarannya dari APBD Gresik sekitar 300 miliar total nya dan untuk normalisasi itu anggarannya dari APBD Gresik sekitar 5 miliar”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa total keseluruhan dana untuk penanganan kali lamong membutuhkan dana 1 T. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sumberdaya anggaran yang diberikan Pemkab Gresik hanya sebesar 300 miliar untuk pembebasan lahan di bantaran sungai kali lamong yang berasal APBD Gresik dan Normalisasi sebesar 5 miliar juga dari APBD Gresik. Sedangkan anggaran untuk pembuatan tanggul dan pembuatan waduk itu masing-masing sekitar 1 triliun yang berasal dari pemerintah pusat.

c. Sumberdaya Wewenang

Sumberdaya wewenang juga merupakan sumberdaya yang cukup penting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya wewenang menjadi sumberdaya yang cukup penting dikarenakan menurut Edward III bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hilmi selaku perencana ahli muda Bappeda Gresik mengenai wewenang untuk program kebijakan penanggulangan kali lamong. Berikut hasil wawancaranya :

---

<sup>77</sup> Ubaidillah, ST,MT (Kepala Bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 Januari 202 jam 09.00 WIB

“Kali lamong merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, jadi kewenangan itu berada di pemerintah pusat, akan tetapi sungai kali lamong ini kan mengalir ke 3 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten Mojokerto, Lamongan, Gresik dan Kota Surabaya jadinya 3 kabupaten dan 1 kota itu juga mempunyai wewenang terhadap kali lamong. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik tidak bisa berbuat banyak dikarenakan harus ada perizinan dulu ke pemerintah pusat. Nah untuk penanggulangan banjir kali lamong di daerah Gresik ini itu eksekutornya yang bagian mengerjakan itu wewenang nya Dinas PUTR ”<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kali lamong ini wewenang dari pemerintah pusat dan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dikarenakan kali lamong mengalir ke daerah tersebut. Untuk Kabupaten Gresik eksekutor atau wewenang penanggulangan banjir kali lamong ialah Dinas PUTR. Dalam hal ini peneliti meminta tanggapan kepada Dinas PUTR terkait sumber daya wewenang kali lamong, berikut hasil wawancara nya :

“Memang benar Kali Lamong ini kewenangan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pemerintah Kabupaten Gresik sudah mendapatkan izin sehingga kami bisa melakukan normalisasi dan pembebasan lahan. Akan tetapi wewenang kali lamong tidak hanya di pemerintah pusat, akan tetapi juga di pemerintah daerah Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Kota Surabaya karena kali lamong mengalir ke daerah tersebut. Sedangkan untuk Pemkab Gresik dinas PUTR yang mengelola langsung mengenai penanggulangan banjir kali lamong di daerah Gresik.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang kali lamong milik BBWS dan juga wewenang pemerintah daerah Gresik, Lamongan Mojokerto dan Kota Surabaya. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sumberdaya wewenang Kali Lamong berada di Wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah

---

<sup>78</sup> Ir. Moh Hilmi MT (Perencana Ahli Muda Bappeda Gresik) wawancara pada tanggal 05 Januari 2023 jam 08.20 WIB

<sup>79</sup> Ubaidillah, ST, MT (Kepala Bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 Januari 2023 jam 09.00

Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan aliran sungai kali lamong mengalir ke daerah tersebut.

d. Sumberdaya Peralatan (Fasilitas)

Sumberdaya peralatan atau fasilitas merupakan sarana yang akan digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Adanya peralatan yang mendukung sarana dan prasarana dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Menurut Edwad III peralatan meliputi berupa tanah, alat yang digunakan, sarana dan prasana yang semuanya dapat memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Pada sumberdaya peralatan ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR mengenai peralatan apa saja yang digunakan dalam normalisasi kali lamong, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk normalisasi kali lamong menggunakan alat berat berupa bego eskavator untuk mengeruk, memperdalam dan melabarkan kali lamong. Alat bego eskavator itu milik dinas PUTR sehingga semua peralatan untuk normalisasi kali lamong tidak ada yang menyewa semuanya milik Dinas PUTR dan pelaksana pengerjaan kali lamong juga masih dibawah naungan dinas PUTR ”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasannya sumberdaya peralatan untuk normalisasi kali lamong berupa bego milik dari Dinas PUTR. Dalam hal ini peneliti meminta tanggapan kepada pengawas lapangan normalisasi kali lamong terkait sumberdaya peralatan yang digunakan dalam normalisasi kali lamong di desa Gluronploso. Berikut hasil wawancaranya :

---

<sup>80</sup> Ubaidillah, ST, Mt (kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 Januari 2022 jam 09.00 WIB

“Pengerukan dan pelebaran kali lamong itu yang mengerjakan dari orang dinas PUTR. Saya disini hanya sebagai pengawas lapangan saja kemudian alat-alat peralatan untuk normalisasi kali lamong seperti bego itu juga dari dinas PUTR.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dinas PUTR dan pengawas lapangan desa gluronploso maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya peralatan untuk normalisasi kali lamong berupa alat berat bego milik Dinas PUTR. Untuk pembebasan lahan peneliti juga melakukan wawancara kepada perencana ahli muda Bappeda Gresik yakni Pak Hilmi mengenai sumberdaya peralatan yang digunakan untuk pembebasan lahan di Desa Jono. Berikut hasil wawancara nya :

“Dalam pembuatan tanggul diperlukan lahan, untuk itu Pemkab Gresik melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi ke warga desa yang lahannya sudah ditentukan oleh BBWS untuk pembuatan tanggul. Lahan yang dibeli sesuai dengan patokan desain dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.”<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumberdaya peralatan untuk pembebasan lahan di desa jono berupa tanah yang dibeli pemerintah yang nanti nya akan dibuatkan tanggul oleh BBWS BS. Dalam hal ini peneliti meminta tanggapan kepada warga desa jono yakni bu Sugiharti yang tanah nya di beli oleh pemkab Gresik untuk pembuatan tanggul, berikut hasil wawancara nya :

“Pembongkoran rumah sejak bulan april setelah tanda tangan uang ganti rugi, tapi karena ada yang tanah sengketa jadinya agak lama bulan mei baru dimulai pembongkaran semua rata. Dapet uang ganti rugi itu sesuai bidang tanah nya, jika ada tanaman apa itu juga di ganti rugi misal ada pohon mangga, bunga apa gitu juga di ganti rugi. Harga rumah satu ada yg 300,400,700 juta sesuai luas bidang tanah nya.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Kemadi (pengawas lapangan normalisasi kali lamong di Desa Gluronploso) wawancara pada tanggal 11 Januari 2023 jam 12.00 WIB

<sup>82</sup> Ubaidillah, ST, MT (kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR) wawancara pada tanggal 11 Januari 2022 jam 09.00 WIB

<sup>83</sup> Bu Sugiharti (warga desa Jono yang rumahnya di bebaskan lahannya oleh Pemkab Gresik) wawancara pada tanggal 06 Januari 2023 jam 11.10

Dari hasil wawancara peneliti dengan warga desa jono maka sumberdaya peralatan untuk pembebasan lahan di desa jono berupa tanah. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sumberdaya peralatan untuk normalisasi kali lamong berupa alat berat bego milik Dinas PUTR sedangkan sumber daya peralatan untuk pembebasan lahan di desa jono berupa tanah warga yang dibeli pemerintah yang nantinya akan dibuahkan tanggul oleh BBWS.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam mewujudkan kebijakan ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa sumberdaya. Sumberdaya manusia nya dalam hal ini pemerintah Gresik melalui Bappeda menunjuk Dinas PUTR selain Dinas PUTR untuk memastikan bahwa program penanggulangan kali lamong ini berjalan dengan baik maka ada pengawas lapangan yang merupakan unsur dari masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk sumber daya anggarannya sebesar 300 miliar untuk pembebasan lahan yang berasal dari APBD Gresik sedangkan untuk normalisasi sebesar 5 miliar juga dari APBD Gresik. Lalu untuk pembuatan tanggul dan waduk masing masing sebesar 1 triliun berasal dari pemerintah pusat. Sumberdaya wewenang kali lamong milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) akan tetapi sungai kali lamong ini mengalir di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya sehingga untuk penanganan kali lamong yang berhubungan dengan masing-masing kabupaten ini akan menjadi wewenang kabupaten masing-masing termasuk kabupaten Gresik. Kemudian sumberdaya peralatan untuk normalisasi berupa bego dan alat berat yang berasal dari Dinas PUTR. Sedangkan sumberdaya peralatan untuk pembuatan tanggul yakni berupa pembebasan lahan dengan cara membeli bangunan rumah, sawah, tambak milik warga desa.

### **3. Disposisi / Sikap**

Edwarad III mengartikan bahwa disposisi merupakan sebuah aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan

harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para warga masyarakat di desa Gluronploso dan Desa Jono. Peneliti mewawancarai Mas Prianto selaku ketua karang taruna desa Gluronploso terkait normalisasi kali lamong yang berada di desa nya, berikut hasil wawancara nya :

“Sebenarnya saya cukup senang mbak dilakukan normalisasi, karena biasanya kalau hujan deras pasti banjir dan menenggelamkan rumah warga akan tetapi setelah normalisasi banjir tetap terjadi tapi tidak sampai masuk kerumah, namun menurut saya ya mbak percuma dilakukan normalisasi ini soalnya gini mbak normalisasi itu kan ngeruk tanah dan sampah yang ada di kali nya lah terus sampah dan tanahnya itu ditaruh nde samping kali jadinya membentuk gundukan yang biasa disebut tanggul tanah, nah itu sampah dan tanah nya kan tercampur jadi satu mbak bukankah hal tersebut bisa menjadi kerusakan lingkungan, jadi itu sih yang tidak saya sukai dari sikap petugas pengerukan kali lamong, sebaiknya dipilah dulu antara sampah dan tanah”<sup>84</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam normalisasi kali lamong di desa Gluronploso. Pekerja pengerjaan normalisasi kali lamong yang dibawah naungan Dinas PUTR tidak memilih antara sampah dan tanah saat pengerukan kali lamong. Menurut ketua karang taruna desa glurnploso hal tersebut jika dilakukan terus menerus dapat merusak lingkungan. Setelah itu peneliti melakukan wawancara lagi kepada salah satu tokoh masyarakat desa gluronploso terkait tanggapan mas Prianto selaku ketua karang taruna desa glronploso. Peneliti mewawancarai pak Suyitno selaku Kepala RW desa gluronploso, berikut hasil wawancaranya :

---

<sup>84</sup> Mas Prianto (ketua karang taruna Desa Gluronploso) wawancara pada tanggal 05 Februari 2023 jam 11.00

“Kalo menurut saya untuk jangka panjang nya mungkin iya bisa merusak tanah nya menjadi tidak subur karena ada campuran plastik nya kan, akan tetapi setahu saya sampahnya itu berupa sampah anorganik seperti daun kering dan hanya sedikit sampah plastiknya. Sampah plastik itu juga dari masyarakatnya sendiri mbak yang buang sampah langsung ke kali nya padahal juga sudah ada peringatan untuk tidak membuang sampah ke sungai akan tetapi masih aja satja warga yang buang sampah ke sungai. Saya sudah melaporkan mengenai hal ini ke pengawas lapangan yang nanti nya agar disampaikan kepada Dinas PUTR akan tetapi hingga saat ini belum ada respon apa-apa”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pekerja pelaksana normalisasi kali lamong tidak memilah sampah saat pengerukan kali lamong kepala RW juga sudah menyapaikan hal tersebut kepada pengawas lapangan akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan respon apa-apa. Peneliti juga melakukan wawancara kepada warga desa jono mengenai disposisi atau sikap pelaksana terkait pembebasan lahan dan pembuatan tanggul di Desa Jono. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bu Maria Ulfa selaku ibu PKK di desa Jono :

“Pembuatan tanggul untuk dapat menanggulangi banjir kali lamong menurut saya itu merupakan sebuah program yang tepat, saat pembuatan tanggul tahun lalu itu kan banyak truck-truck dan alat berat yang masuk ke desa kan, nah itu warga desa nya diberikan sembako mbak dikarenakan jalannya itu dibuat lewat truck-truck dan alat berat jadinya kan polusi makanya diberikan sembako termasuk saya juga diberikan sembako karena rumah saya dekat akses keluar masuk desa. Jadi menurut saya sikap yang dilakukan pemerintah dengan memberikan sembako itu sudah cukup baik mbak, soalnya memang jalan rumah saya jadi banyak debu nya saat dilewai truck-truck besar itu”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sikap pelaksana saat pembebasan lahan untuk pembuatan tanggul kali lamog yakni dengan cara memberikan sembako kepa warga masyarakat desa setempat karena akses

---

<sup>85</sup> Pak Suyitno (kepala RW desa Gluronploso) wawancara pada tanggal 05 Februari jam 12.40 WIB

<sup>86</sup> Maria Ulfa (Ibu PKK warga desa Jono) wawancara pada tanggal 06 Januari jam 10.35 WIB

jalan desa dilwati oleh truck truck besar dan alat berat. Setelah itu peneliti mewawancarai sekretaris desa jono yaitu bapak Suyono untuk meminta tanggapan dari yang disampaikan bu Sugiharti mengenai sikap pelaksana. Berikut hasil wawancara nya :

“Memang ada pemberian sembako akan tetapi tidak semua warga hanya warga yang rumahnya samping jalan yang dilalui oleh truck-truck dan alat berat untuk pembuatan tanggul, kalo menurut saya hal itu juga sudah cukup baik mbak karena pemerintah tetap meletakkan kepentingan, kenyamanan dan keamanan masyarakat diatas kepentingan pembangunan”<sup>87</sup>

Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana yakni petugas pengerukan normalisasi kali lamong sudah cukup baik karena telah mengerjakan normalisasi kali lamong sesuai arahan dari Dinas PUTR akan tetapi petugas pengerukan tidak melakukan pemilihan anantara sampah dengan tanah. Untuk pembuatan tanggul di desa jono menurut peneliti sikap pelaksana nya juga sudah cukup baik karena telah memberikan sembako kepada warga yang samping jalanan rumahnya dilewati oleh truck besar. Dalam hal ini pemerintah masih memikirkan mengenai kenyamanan warga masyarakat nya diatas kepentingan pembangunan tanggul.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Edward III mengatakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Edward menjelaskan terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*.

Standard operational procedure (SOP) penetapan tuntutan internal akan waktu, sumber daya, dan keseragaman dalam suatu organisasi kerja yang rumit dan besar, menurut Winarno. Menurut Edward, keberhasilan juga ditentukan oleh standar operasi yang jelas, pembagian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab antar pelaku, serta hubungan yang tidak

---

<sup>87</sup> Suyono (sekretaris Desa Jono) wawancara pada tanggal 06 Januari 2023 jam 13.00 WIB

harmonis antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya. Ini juga berlaku untuk mekanisme, sistem, dan prosedur untuk menerapkan kebijakan. penerapan kebijakan.

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat memperburuk gangguan komunikasi karena ada potensi kesalahan interpretasi instruksi yang tinggi. Semakin condong pelaksanaan suatu kebijakan, maka diperlukan koordinasi yang lebih luas. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bappeda mengenai struktur organisasi dalam penanggulangan banjir kali lamong, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan. Pemerintah kabupaten Gresik dalam nawa-karsa bupati membuat program Gresik Mapan. Program ini mengenai normalisasi dan pembebasan lahan untuk pembuatan tanggul. Bappeda sebagai perencana dan yang menganggarkan dana sedangkan Dinas PUTR bagian sumber daya air sebagai pelaksana. Akan tetapi Dinas PUTR juga dibantu pengawas lapangan yakni warga desa setempat untuk mengawasi mengenei pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan dalam hal ini badan yang menangani secara langsung mengenai penanggulangan banjir kali lamong ialah Dinas PUTR bagian sumber daya air ”<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Selatan. Dalam hal ini Bupati Gresik membuat nawa-karsa yakni 9 nafas pembangunan menuju Gresik Baru. Nawa karsa mengenai penanganan banjir kali lamong terletak di sebuah program bupati yakni Gresik Mapan. Program Gresik mapan berkomitmen pada normalisasi kali lamong yakni berupa pengerukan, pelebaran dan memperdalam

---

<sup>88</sup> Ir Moh. Hilmi MT (Perencana Ahli Muda Bappeda) wawancara pada tanggal 05 januari di jam 08.20

kali. Selain normalisasi kali lamong program Gresik Mapan juga berkomitmen mengenai pembebasan lahan yang nantinya akan dibuatkan tanggul oleh BBWS BS.

Kemudian program Gresik mapan tersebut diturunkan kepada Bappeda Gresik sebagai perencana dan sebagai memberikan anggaran dana untuk program ini. Kemudian Program Gresik Mapan ini menjadi wewenang kepada Dinas PUTR bagian Sumber Daya Air. Disini Dinas PUTR berperan sebagai eksekutornya yakni penyelenggara Program Gresik Mapan untuk melancarkan program ini Dinas PUTR menunjuk pengawas lapangan di masing-masing desa untuk mengawasi pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan di masing-masing desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik George C. Edward. Berikut penyajian tabel mengenai implementasi kebijakan pemerintah Gresik dengan Teori George C. Edward. Dinamika politik program kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong yakni ketika pemerintah kabupaten Gresik hendak membeli lahan warga masyarakat yang ada di bantaran daerah sungai kali lamong untuk dibuatkan tanggul parapet oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS). Akan tetapi, warga masyarakat di bantaran daerah aliran sungai kali lamong mematok harga yang sangat tinggi. Sehingga pemerintah kabupaten Gresik dan BBWS BS tidak dapat melaksanakan program kebijakan dan tidak dapat mensegerakan pembuatan tanggul parapet. Oleh karena itu, banjir karena luapan kali lamong masih terus saja terjadi di kabupaten Gresik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegagalan tata kelola penanggulangan banjir kali lamong di Kabupaten Gresik disebabkan karena kelemahan struktur birokrasi ditambah dengan kesadaran warga masyarakatnya.

**Tabel 4.1**

**Teori Implementasi George C. Edward III dalam Kebijakan Pemerintah  
Kabupaten Gresik menanggulangi banjir kali lamong**

No	Unsur	Temuan
1.	Komunikasi	Adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang jelas dan konsisten. Dalam hal ini pemerintah selaku Dinas PUTR melakukan sosialisasi mengenai normalisasi kali lamong di Desa Gluronploso dan Pembebasan lahan untuk pembuatan tanggul di Desa Jono. Sosialisasi untuk normalisasi dilakukan sebulan sebelum dilakukan normalisasi sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan sosialisasi pada bulan april 2021 dan mulai di bebaskan lahannya pada bulan agustus.
2.	Sumberdaya	Dalam mewujudkan kebijakan ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa sumberdaya. Sumberdaya manusia nya dalam hal ini pemerintah Gresik melalui Bappeda menunjuk Dinas PUTR selain Dinas PUTR untuk memastikan bahwa program penanggulangan kali lamong ini berjalan dengan baik maka ada pengawas lapangan yang merupakan unsur dari masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk sumber daya anggaran nya sebesar 300 miliar untuk pembebasan lahan yang berasal dari APBD Gresik sedangkan untuk normalisasi sebesar 5 miliar juga dari APBD Gresik. Lalu untuk pembuatan tanggul dan waduk masing masing sebesar 1 triliun berasal dari pemerintah pusat. Sumberdaya wewenang kali lamong milik balai besar wilayah sungai bengawan solo (BBWS BS) akan tetapi sungai kali lamong ini mengalir di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya sehingga untuk penanganan kali lamong yang berhubungan dengan masing-masing kabupaten ini akan menjadi wewenang kabupaten masing-masing termasuk kabupaten Gresik. Kemudian sumberdaya peralatan untuk normalisasi berupa bego dan alat berat yang berasal dari Dinas PUTR. Sedangkan sumberdaya peralatan untuk pembuatan tanggul yakni berupa pembebasan lahan dengan cara membeli bangunan rumah, sawah, tambak milik warga desa.

3.	Disposisi / Sikap	Sikap pelaksana pekerja normalisasi kali lamong saat pengerukan kali lamong yakni tidak memilih antara sampah dan tanah melainkan langsung mencampurkannya jadi satu menjadi tanggul tanah. Hal ini jika dilakukan terus menerus dapat merusak lingkungan dan kesuburan tanah. Sedangkan sikap pelaksana pemerintah untuk pembebasan lahan yakni memberikan sembako kepada warga masyarakatnya dikarenakan jalan desa dilewati oleh banyak truck-truck.
4.	Struktur Birokrasi	Struktur organisasi dalam penanggulangan banjir kali lamong ini yakni mula nya Bupati Gresik membuat nawakarsa mengenai penanganan banjir kali lamong terletak di sebuah program bupati yakni Gresik Mapan. Program Gresik mapan berkomitmen pada normalisasi dan pembebasan lahan. Kemudian program Gresik mapan tersebut diturunkan kepada Bappeda Gresik sebagai perencana dan sebagai memberikan anggaran dana untuk program ini. Kemudian Program Gresik Mapan ini menjadi wewenang kepada Dinas PUTR bagian Sumber Daya Air. Disini Dinas PUTR berperan sebagai eksekutornya yakni penyelenggara Program Gresik Mapan untuk melancarkan program ini Dinas PUTR menunjuk pengawas lapangan di masing-masing desa untuk mengawasi pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan di masing-masing desa

## 2. Faktor penyebab belum optimal nya penanganan banjir kali lamong Gresik

Degradasi kondisi DAS Kali Lamong menyebabkan banjir terjadi hampir tiap tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi selama ini sangat merugikan warga masyarakat secara luas baik kerugian harta benda dan kerugian sosial lainnya serta korban nyawa.<sup>89</sup>

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Bapak Ubaidillah selaku kepala bidang sumber daya air Dinas PUTR kab Gresik mengatakan bahwasanya bencana banjir kali lamong ini sudah terjadi sejak dahulu. Akan

<sup>89</sup> Dokumenan Paparan Pengendalian banjir kali lamong milik Bappeda

tetapi pada saat dahulu bencana banjir itu tidak sering terjadi dan kalau pun banjir debit air banjir nya tidak sebanyak sekarang lalu kali lamong pun masih dapat menampung sehingga tidak membuat terjadi luapan kali lamong dan intensitas air nya cepat surut lalu banjir itu hanya berada di bantaran pinggir sungai kali lamong tidak sampai masuk ke rumah warga, akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman banjir kali lamong terjadi setiap tahun dan debit air yang datang dari hulu pun juga semakin bertambah banyak yang membuat kali lamong tidak dapat menampung debit air yang datang, air banjir nya juga lama surut nya hingga bisa mencapai seminggu an lebih baru surut air nya. Debit air yang masuk ke kali lamong melebihi daya tampung kali sehingga menyebabkan luapan kali lamong masuk ke rumah, jalan dan persawahan milik warga.

Meskipun bapak Robach Maksu sudah menjabat selama 2 periode begitu pula Bapak Sambari Halim ini, akan tetapi permasalahan banjir kali lamong ini belum teralisasi saat ini hingga ganti bupati yang sekarang yaitu bapak Fandi Akhamd Yani. Peran Pemerintahan Kabupaten Gresik pada saat Pemerintahan bapak Robach Maksu dalam menanggulangi banjir kali lamong ini yaitu dengan cara membuat waduk akan tetapi sebagian waduk-waduk di sekitar Kali Lamong yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara air (retensi) malah dibuat oleh warga setempat disewakan seperti untuk memelihara ikan atau ditanami tanaman. Bahkan ketika saat banjir tiba karena lupan kali lamong maka warga sekitar daerah aliran sungai (DAS) berinisiatif sendiri membuat tanggul tanah. Peran Pemerintahan kabupaten Gresik pada saat pemerintahan Sambari Halim saat menanggulangi banjir kali lamong yaitu dengan cara meninggikan jalan raya serta membuat tanggul tanah dimana di daerah yang beresiko dan rawan banjir. Akan tetapi meskipun sudah melakukan upaya tersebut banjir masih tetap terjadi walaupun tidak separah dari tahun sebelumnya.<sup>90</sup>

Hingga pada saat ini masa pemerintahan bapak Fandi Akhamd Yani menjadikan penanganan banjir kali lamong sebagai prioritas utama. Pemerintah

---

<sup>90</sup> Data Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, Saat Kejadian Banjir Kali Lamong Gresik, Jawa Timur.

kabupaten Gresik berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dalam menangani banjir kali lamong. Pemkab Gresik melakukan pengadaan lahan sedangkan BBWSBS membuat tanggul parapet. Pada tahun 2022-2022 Pemkab Gresik sudah melakukan normalisasi kali lamong di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng dan Cerme. Pemkab Gresik juga melakukan pengadaan lahan di Desa Sukoanyar, Putat Lor, Morowudi, Jono, Tambak Beras, Wotansari, Sekarputih, Lundo setelah dilakukan pengadaan lahan maka nanti nya akan dibuatkan BBWSBS tanggul parapet.<sup>91</sup>

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya pada periode bupati sebelumnya sudah dilakukan program penanganan banjir akan tetapi belum efektif dan banjir masih saja terjadi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab belum optimal nya penanganan banjir kali lamong. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasi penanganan banjir kali lamong pada era bupati sebelumnya. Peneliti akan mengkategorikan faktor-faktor penyebab belum teralisainya penanganan banjir kali lamong yakni Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, penyebab banjir kali lamong terjadi dikarenakan faktor dari luar bukan berasal dari kali lamong nya sendiri. Dalam hal ini faktor eksternal yakni faktor kewenangan dan faktor keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor internal adalah faktor dari dalam yang berasal dari sungai kali lamong sendiri. Dalam hal ini faktor internal terdiri dari faktor karakteristik sungai dan faktor tata ruang wilayah. Berikut penjelasan peneliti mengenai faktor eksternal penyebab belum teralisainya penanggulangan banjir kali lamong :

### **1. Faktor Kewenangan**

Kekhawatiran ada pemisahan horizontal dan vertikal tanggung jawab kelembagaan dan kewenangan dalam menanggapi banjir Kali Lamong. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab

---

<sup>91</sup> <https://independensi.com/2022/03/20/normalisasi-kali-lamong-yang-dilakukan-pemkab-gresik-jadi-contoh-daerah-lain-untuk-atasi-banjir/> Diakses pada 05 Maret 2023

mengelola sungai bertanggung jawab mengelola Kali Lamong (BBWSBS). Pemerintah Kabupaten Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Kota Surabaya juga terlibat dalam pengelolaan Kali Lamong selain BBWS Bengawan Solo. Sementara pemerintah pusat melalui BBWS Bengawan Solo bertanggung jawab atas pekerjaan aktual (fisik) yakni membeli tanah warga masyarakat desa di bantaran sungai kali lamong.<sup>92</sup>

## **2. Faktor Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan anggaran atau ketiadaan dana untuk mengatasi banjir disebabkan ketidakpastian seputar pembelian tanah untuk pembangunan tanggul Kali Lamong, yang akan di bangun di wilayah Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Surabaya. Akan tetapi untuk wilayah surabaya pembebasan lahan sudah dilakukan sehingga BBWS membuat tanggul di Daerah Surabaya.<sup>93</sup> Sedangkan di Gresik pembebasan lahan belum dilakukan. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Gresik masih belum bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan warga wilayah Gresik selatan yang terkena banjir akibat dari luapan Sungai Kali Lamong.

Pembebasan tanah atau lahan yang sulit menyebabkan normalisasi Kali Lamong terlambat, hal ini dikarenakan warga yang tinggal di bantaran sungai mematok harga kompensasi cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan proses dari pembebasan lahan terdapat hambatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal penyebab belum teralisasinya penanganan banjir kali lamong berasal dari kewenangan pengelolaan kali lamong masih berada di pemerintah pusat yakni Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS). Selain BBWS Bengawan Solo, penanganan Kali Lamong juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Gresik, Mojokerto dan Kota Surabaya. Dan untuk faktor keterbatasan anggaran penanganan banjir kali lamong dikarenakan BBWS ragu karena pembebasan

---

<sup>92</sup> <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php/tag/kali-lamong/> Diakses pada 04 Maret 2023

<sup>93</sup> <https://surabaya.go.id/id/berita/58196/tinjau-tanggul-kali-lamong-wali-kota-risma-ingin-pastikan-kondisinya-kuat-menampung-aliran-air> diakses pada 04 maret 2023

lahan untuk pembangunan tanggul Sungai Kali Lamong di daerah Gresik masih belum jelas. Selain faktor eksternal penyebab belum teralisasinya penanggulangan banjir Kali Lamong Gresik juga disebabkan oleh faktor internal. Berikut penjelasan peneliti mengenai penyebab faktor internal belum teralisasinya penanganan banjir Kali Lamong di Gresik :

### **1. Faktor Karakteristik Sungai**

Penyebab utama banjir Kali Lamong adalah masalah yang berkaitan dengan karakteristik sungai. Poin-poin berikut menyoroti beberapa karakteristik sungai:

- a. Badan sungai Kali Lamong dari segi topografi cenderung landai, akan tetapi badan sungai Kali Lamong yang berada di Gresik sangat landai. Untuk mencegah air mengalir deras ke laut lepas. Sehingga saat hujan deras dan permukaan air laut naik, permukaan air di Kali Lamong naik di atas bibir sungai dan meluap, membanjiri perkampungan dan persawahan.
- b. Kapasitas sungai terbatas dalam hal ini daya tampung Kali Lamong hanya mampu menampung debit sekitar 250 m<sup>3</sup>/detik. Jumlah air yang masuk ke sungai bisa mencapai 750 m<sup>3</sup>/detik. Menurut data lain, Sungai Lamong memiliki debit rata-rata 270 m<sup>3</sup>/detik. Menurut sumber lain, debit sungai melebihi 400–500 m<sup>3</sup>/detik saat hujan turun di wilayah Gresik. Pendangkalan alur sungai, penyempitan, dan pemukiman di kanan kiri sungai menjadi penyebab menurunnya daya tampung Kali Lamong.
- c. Tanggul berada dalam kondisi kritis sehingga rawan rusak atau jebol saat terjadi banjir. Akibatnya, tidak bisa menahan aliran dan luapan air dari Sungai Lamong, dan jebolnya tanggul berdampak pada meluasnya banjir.
- d. Jarak kurang lebih 7 km antara Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme masih banyak bantaran sungai tanpa tanggul. Daerah Gresik mengalami banjir terparah karena dari

131 kilometer Sungai Lamong, 54 kilometer berada di sana dan tidak semuanya berupa tanggul..

- e. Perkembangan permukiman yang menjerok ke alur sungai dan terjadinya sedimentasi menjadi penyebab penyempitan alur sungai. Tubuh sungai di Kali Lamong menjadi lebih terkendala oleh sedimentasi.
- f. Laju sedimentasi yang tinggi, yang menunjukkan bahwa pendangkalan terjadi secara terus-menerus dengan laju sedimentasi 12 cm per tahun, menjadi penyebab pendangkalan muara. Bahkan lebih besar dari 4 meter pendangkalan kini telah tercapai. Pendangkalan ini terjadi akibat erosi di bagian hulu dan gerusan di tepi kanan dan kiri sungai. Pada studi yang dilakukan pada tahun 2016, diketahui bahwa nilai pelepasan nisbah sedimen (SDR) yang terjadi di Kali Lamong sekitar 0,17 atau 17% dengan nilai erosi sebesar 2.943 ton/ha/tahun. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan besarnya erosi dan sedimentasi yang terjadi di Kali Lamong cukup besar, sehingga Kali Lamong pada dasarnya tidak bertambah sempit namun bertambah dangkal.

## **2. Faktor Tata Ruang Wilayah**

Akibat perubahan tata ruang DAS Kali Lamong baik di wilayah hulu maupun hilir sungai, menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Kali Lamong berkaitan dengan faktor tersebut. Temuan analisis menunjukkan bahwa berikut ini perubahan bentuk tata ruang :

- a. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan DAS Kali Lamong, dimana terjadi penurunan luasan hutan di bagian hulu yakni daerah Mojokerto dan terjadi perubahan fungsi menjadi pemukiman atau tempat usaha di sepanjang hilir sungai yakni daerah Gresik. Banyaknya bangunan di bantaran sungai menjadi indikator visual bagaimana fungsi Kali Lamong berubah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri.

- b. Pembangunan bangunan tempat tinggal dan pendirian berbagai industri telah mengubah cara penggunaan tepian sungai. Terdapat sekitar 1.300 bangunan dan 17 unit industri di bantaran Sungai Lamong yang membelah wilayah Kabupaten Gresik.
- c. Hilangnya waduk. Dimana hal ini waduk yang berada di dekat Kali Lamong yang seharusnya berfungsi sebagai penampungan air sementara atau retensi, kini sebagian disewakan untuk menanam tanaman atau memelihara ikan.

### **3. Faktor Manusia**

Menurut hasil penelitian observasi yang dilakukan peneliti yang mana peneliti terjun langsung ke bantaran sungai kali lamong. Maka peneliti masih menemukan terdapat beberapa sampah rumah tangga milik masyarakat desa yang dibuang sembarangan di tepi sungai kali lamong. Meskipun di lahan tersebut sudah terdapat tanda peringatan tidak boleh membuang sampah sembarangan akan tetapi masih ada warga yang membuang sampah di pinggir sungai. Hal ini juga ditemukan peneliti saat menyaksikan pengerukan kali lamong di Desa Gluronploso hasil pengerukan kali lamong 80 % tanah dan sisa nya yakni sampah rumah tangga yang dibuang warga desa ke kali lamong. Meskipun hanya beberapa sampah rumah tangga akan tetapi hal ini jika dilakukan terus menerus maka banjir kali lamong akan masih terus terjadi.

Seiring dengan perkembangan jaman faktor-faktor penyebab belum teralisasinya penanganan banjir kali lamong sudah mulai terselesaikan dengan dibuatnya program khusus penanganan kali lamong. Program ini berada di bawah naungan bupati saat ini yakni Program Gresik Mapan. Melalui di adakannya Program Gresik Mapan diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir kali lamong yang terjadi hampir tiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi khusus untuk penanggulangan banjir kali lamong Gresik agar program kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dapat teralisasi. Pada sub bahasan

yang terakhir peneliti akan menjelaskan mengenai strategi penanggulangan banjir kali lamong.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab belum teralisasinya penanggulangan banjir kali lamong terdiri dari dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari faktor kewenangan, faktor keterbatasan anggaran sedangkan faktor internal terdiri dari faktor tata ruang wilayah, faktor karakteristik sungai dan faktor manusia. Berikut peneliti sajikan tabel mengenai penyebab belum teralisasinya penanggulangan banjir kali lamong.

**Tabel 4.2**  
**Tabel Faktor Penyebab tidak teralisasinya penanggulangan banjir kali lamong Gresik**

No	Faktor	Penghambat	Temuan
1.	Eksternal	Kewenangan	Pengelolaan Kali Lamong masuk Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Kementerian PU yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Selain BBWS Bengawan Solo, penanganan Kali Lamong juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Gresik, Mojokerto dan Kota Surabaya.
2.	Eksternal	Keterbatasan Anggaran	Keterbatasan anggaran atau minimnya anggaran penanganan banjir tersebut dikarenakan BBWS ragu karena pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul Sungai Kali Lamong yang meliputi empat daerah yakni Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Surabaya belum jelas. Pembebasan tanah atau lahan yang sulit menyebabkan normalisasi Kali Lamong terlambat, hal ini dikarenakan warga yang tinggal di bantaran sungai mematok harga kompensasi cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan proses dari pembebasan lahan terdapat hambatan.
3.	Internal	Karakteristik Sungai	Badan sungai dari segi topografi cenderung landai, tetapi badan sungai kali

			<p>Lamong di Gresik sangat landai. Untuk mencegah air mengalir deras ke laut lepas. Sehingga saat hujan deras dan permukaan air laut naik, permukaan air di Kali Lamong naik di atas bibir sungai dan meluap, membanjiri perkampungan dan persawahan. Kapasitas sungai terbatas dalam hal ini daya tampung kali lamong hanya mampu menampung debit sekitar 250 m<sup>3</sup>/detik. Jumlah air yang masuk ke sungai bisa mencapai 750 m<sup>3</sup>/detik. Tanggul berada dalam kondisi kritis sehingga rawan rusak atau jebol saat terjadi banjir. Jarak kurang lebih 7 km antara Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme masih banyak bantaran sungai tanpa tanggul. Perkembangan permukiman yang menjorok ke alur sungai dan terjadinya sedimentasi menjadi penyebab penyempitan alur sungai. Laju sedimentasi yang tinggi, yang menunjukkan bahwa pendangkalan terjadi secara terus-menerus dengan laju sedimentasi 12 cm per tahun, menjadi penyebab pendangkalan muara</p>
4.	Internal	Tata Ruang Wilayah	<p>Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan DAS Kali Lamong, dimana terjadi penurunan luasan hutan di bagian hulu yakni daerah Mojokerto dan terjadi perubahan fungsi menjadi pemukiman atau tempat usaha di sepanjang hilir sungai yakni daerah Gresik. Pembangunan bangunan tempat tinggal dan pendirian berbagai industri telah mengubah cara penggunaan tepian sungai. Terdapat sekitar 1.300 bangunan dan 17 unit industri di bantaran Sungai Lamong yang membelah wilayah Kabupaten Gresik. Hilangnya waduk. Dimana hal ini waduk yang berada di dekat Kali Lamong yang seharusnya berfungsi sebagai penampungan air sementara atau retensi, kini sebagian disewakan untuk menanam tanaman atau memelihara ikan.</p>
5.	Internal	Manusia	<p>Terdapat beberapa warga masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di kali lamong. Hal ini dibuktikan ketika</p>

			normalisasi pengerukan terdapat sampah rumah tangga.
--	--	--	--

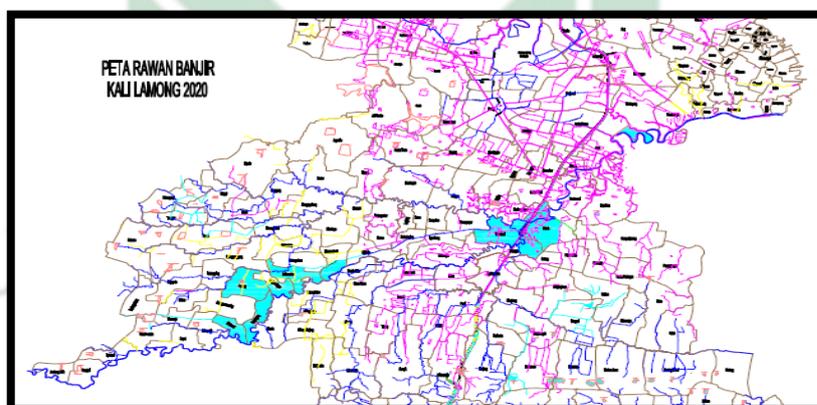
### 3. Strategi penanggulangan banjir kali lamong Gresik

Banjir akibat luapan Sungai Lamong biasanya terjadi saat hujan deras mengguyur Gresik, Lamongan, dan Mojokerto. Banjir tersebut menyebabkan pemukiman warga, pedesaan, sawah, tambak, dan jalan raya terendam. Meski berbagai langkah perbaikan telah dilakukan pemerintah, seperti peninggian jalan tol dan pembangunan tanggul di kawasan rawan banjir, banjir tetap saja terjadi.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik sering mengalami masalah banjir akibat debit Sungai Lamong. Banjir Kali Lamong yang terjadi antara pertengahan Desember 2013 hingga awal Januari 2014 merendam sekitar 2.658,2 hektar lahan pertanian, dimana tanaman padi yang terkena dampak dinyatakan puso seluas 1.985 hektar, hal ini menurut informasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik.<sup>94</sup>

**Gambar 4.4**

**Peta rawan banjir kali lamong Gresik**



*Sumber : Bappeda Gresik*

Luapan Kali Lamong setiap tahun menggenangi dan bahkan merendam wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kedamean. Hingga pada tahun 2014 menurut data BPNB luapan kali lamong menyebabkan sebagian kabupaten Gresik terendam banjir. Dampaknya ialah

<sup>94</sup> Dokumen Bappeda Paparan Pengendalian banjir kali lamong

sebanyak 7.957 rumah, ratusan hektar sawah, dan tambak terendam banjir karena luapan kali lamong yang berada di 2 desa dari 5 kecamatan yang ada di kabupaten Gresik. Sejak kejadian banjir pada tahun 2014 itu hingga saat ini banjir yang di karenakan luapan kali lamong selalu terjadi tiap tahunnya dan menjadi langganan untuk wilayah kecamatan Balongpangang, Benjeng, Cerme, Mengganti, Wriginanom dan Kedamean.<sup>95</sup>

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti di beberapa desa yang rawan banjir maka peneliti mendapatkan hasil bahwasanya pada saat banjir tahun 2014 tersebut semasa pemerintahan bapak robach maksum pemerintah kabupaten Gresik membuat kebijakan normalisasi kali lamong di beberapa desa dan kecamatan yang paling parah terdampak banjir nya, salah satu nya desa gluronploso pada saat tahun 2014 baru pertama kali dilakukan normalisasi kali lamong berupa pengerukan dan pelebaran kali. Pengerukan hal ini yaitu mengeruk tanah dan sampah yang berada di kali lamong sehingga daya tampung kali lamong bertambah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanggulangan banjir kali lamong pada periode bupati sebelumnya sudah dilakukan akan tetapi belum efektif dalam mengatasi banjir kali lamong Gresik. Oleh sebab itu perlu adanya strategi khusus dalam penanggulangan banjir kali lamong agar program kebijakan penanggulangan banjir kali lamong dapat terealisasi dan dapat mengatasi permasalahan banjir kali lamong yang terjadi hampir tiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai strategi khusus penanggulangan banjir kali lamong :

### **1. Koordinasi**

Dalam hal ini instansi harus melakukan koordinasi secara intensif lagi untuk pengendalian banjir karena banjir sudah berkali kali terjadi akan tetapi upaya darurat, untuk penanganan lebih serius tampaknya belum ada. Agar tepat sasaran, penanganan Kali Lamong perlu dilakukan secara terpadu dengan koordinasi lintas wilayah dan

---

<sup>95</sup> <https://bnpb.go.id/berita/kali-lamong-meluap-sembilan-desa-di-gresik-terendam-banjir> diakses pada 02 Maret 2023

sektoral, termasuk melibatkan jasa tirta dan industri di sekitar Kali Lamong. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Gresik melakukan koordinasi atau kolaborasi.<sup>96</sup>

Terkait penanggulangan banjir di Kali Lamong, terdapat persoalan pembagian tanggung jawab dan kewenangan kelembagaan secara horizontal dan vertikal. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang diatur oleh Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo merupakan tempat pengelolaan Kali Lamong. Balai Besar Wilayah Sungai akan melakukan normalisasi ke daerah-daerah yang paling kritis penyebab meluapnya kali lamong. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Kota Surabaya juga terlibat dalam pengelolaan Kali Lamong selain BBWS Bengawan Solo. Yang memiliki tugas untuk pembebasan lahan jatuh ke daerah masing masing yang dialiri kali lamong, sedangkan tenaga fisik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui BBWS Bengawan Solo. Dengan melibatkan instansi pemerintah sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, dilakukan upaya untuk menurunkan risiko bencana baik pada tahap pra maupun pasca bencana.

Penanganan kegiatan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing lembaga atau instansi. Karena BBWSBS memiliki wewenang atas DAS Kali Lamong, maka BBWSBS bertanggung jawab untuk mengurangi resiko banjir. Akan tetapi sungai kali lamong ini mengalir ke dalam empat wilayah daerah yakni Kabupaten Mojokerto, kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya maka dari itu kewenangan kali lamong juga milik ke empat daerah yang teralliri sungai kali lamong tersebut.

## **2. Manajemen**

Membuat manajemen resiko bencana dengan skenario banjir di Kali Lamong dapat dilakukan dengan normalisasi kali lamong yakni

---

<sup>96</sup> Eko Budi Santoso “*Manajemen Resiko bencana banjir kali lamong pada kawasan peri-urban Surabaya-Gresik melalui pendekatan kelembagaan*” Jurnal Penataan Ruang, Volume 8, Nomer 2

mengeruk sungai, memperbaiki bantaran sungai, membuat kolam retensi, dan memfungsikan waduk di sekitarnya. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga berperan aktif dalam hal ini, selain pemerintah kabupaten/kota. Penanganan kegiatan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing lembaga atau instansi.

Menganalisis status dan fungsi instansi pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan banjir sangat penting untuk mengatasi permasalahan banjir di Kali Lamong yang terjadi di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. membuat daftar infrastruktur yang rusak dan berupaya peninggian tanggul yang sudah ada yang telah melemah akibat tanggul yang jebol akibat bencana banjir. Selain itu, pengerukan aliran Kali Lamong juga akan dilakukan. Meringankan korban banjir dengan memberikan bantuan sembako dan bantuan makanan. \

Membantu proses pembebasan tanah untuk pembangunan tanggul dan normalisasi kali. Melakukan normalisasi sungai di wilayah yang dikuasainya dan mengupayakan pembebasan tanah milik penduduk yang menjorok ke dalam batas dengan Kali Lamong.

### **3. Anggaran**

Karena ketidakpastian pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul Kali Lamong yang meliputi empat lokasi yakni Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Surabaya, BBWS belum bisa menyiapkan anggaran penanganan banjir.<sup>97</sup> Warga Kabupaten Gresik bagian selatan yang terendam banjir luapan Kali Lamong tidak banyak tertolong oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Penyebabnya adalah keterbatasan dana yang dianggarkan.

Dalam hal ini strategi penangan banjir kali lamong pemerintah kabupaten Gresik dalam variabel anggaran adalah dengan menambah jumlah anggaran baik dari APBN atau APBD agar cepat teralisasinya

---

<sup>97</sup> Eko Budi Santoso “*Manajemen Resiko bencana banjir kali lamong pada kawasan peri-urban Surabaya-Gresik melalui pendekatan kelembagaan*” Jurnal Penataan Ruang, Volume 8, Nomer 2

program kebijakan penanggulangan banjir kali lamong. Serta melakukan pembebasan lahan agar pihak BBWS dapat memberikan bantuan dengan pembuatan tanggul.

#### 4. Manusia

Pembebasan lahan yang sulit diproyeksikan akan membuat Sungai Lamong kembali normal. Hal ini disebabkan oleh penduduk tepi sungai yang menilai tinggi perolehan tanah mereka. Mereka menuntut penggantian dengan jumlah dolar yang sangat besar. Untuk menciptakan tantangan bagi prosedur pengadaan tanah. Orang-orang yang tinggal di bantaran sungai Lamong berusaha mendapatkan imbalan sebagai ganti kebebasan mereka.

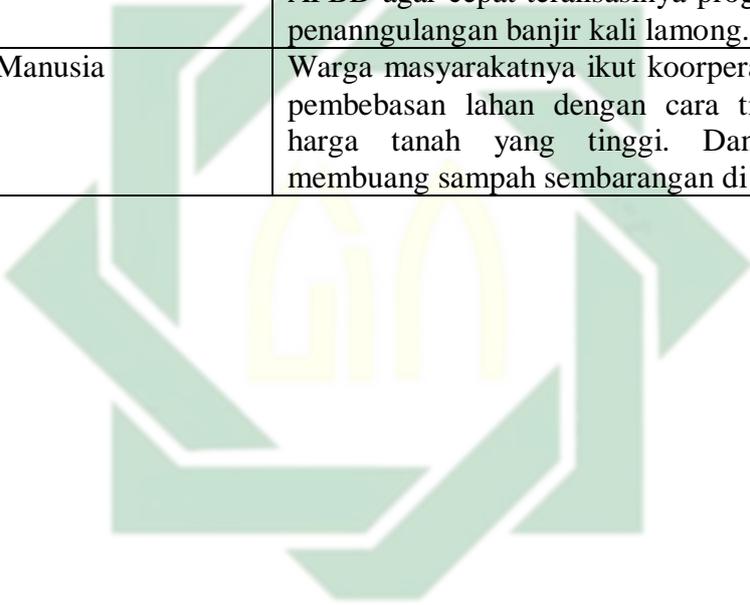
Warga masyarakatnya ikut kooperatif bila terjadi pembebasan lahan dengan cara tidak mematok harga tanah yang tinggi. Dan juga tidak membuang sampah sembarangan di kali lamong. Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa sampah rumah tangga di pinggir kali lamong.

Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk penanggulangan banjir kali lamong agar program kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dapat teralisasi. Berikut penyajian tabel hasil kesimpulan dari strategi penanganan banjir kali lamong Gresik oleh peneliti.

**Tabel 4.3**  
**Strategi Penanggulangan Banjir Kali Lamong Gresik**

No.	Strategi	Temuan
1.	Koordinasi	Dalam hal ini instansi harus melakukan koordinasi secara intensif lagi untuk pengendalian banjir karena banjir sudah berkali kali terjadi akan tetapi upaya darurat, untuk penanganan lebih serius tampaknya belum ada. Agar tepat sasaran, penanganan Kali Lamong perlu dilakukan secara terpadu dengan koordinasi lintas wilayah dan sektoral, termasuk melibatkan jasa tirta dan industri di sekitar Kali Lamong. Oleh karena itu

		pemerintah kabupaten Gresik melakukan koordinasi atau kolaborasi.
2.	Manajemen	Membuat manajemen resiko bencana dengan membayangkan skenario banjir di Kali Lamong dapat dihindari dengan mengeruk sungai, memperbaiki bantaran sungai, membuat kolam retensi, dan memfungsikan waduk di sekitarnya. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga berperan aktif dalam hal ini, selain pemerintah kabupaten/kota. Penanganan kegiatan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing lembaga atau instansi.
3.	Anggaran	Menambah jumlah anggaran baik dari APBN atau APBD agar cepat teralisasinya program kebijakan penanggulangan banjir kali lamong.
4.	Manusia	Warga masyarakatnya ikut kooperatif bila terjadi pembebasan lahan dengan cara tidak mematok harga tanah yang tinggi. Dan juga tidak membuang sampah sembarangan di kali lamong



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Program kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam penanggulangan banjir kali lamong berada di bawah naungan bupati yakni Program Gresik Mapan. Pada program Gresik Mapan pemerintah kabupaten Gresik dalam mengatasi banjir kali lamong menerapkan normalisasi kali lamong dan pembebasan lahan yang nantinya akan dibuatkan tanggul oleh BBWS BS.

Implementasi kebijakan penanggulangan banjir kali lamong pemerintah kabupaten Gresik dengan teori George C. Edward Hal ini dapat dilihat dari variabel komunikasi terdapat Adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang jelas dan konsisten. Dalam hal ini pemerintah selaku Dinas PUTR melakukan sosialisasi mengenai normalisasi kali lamong di Desa Gluronploso dan Pembebasan lahan untuk pembuatan tanggul di Desa Jono. Pada variabel sumberdaya manusia nya dalam hal ini pemerintah Gresik melalui Bappeda menunjuk Dinas PUTR selain Dinas PUTR untuk memastikan bahwa program penanggulangan kali lamong ini berjalan dengan baik maka ada pengawas lapangan. Untuk sumber daya anggaran nya sebesar 300 miliar untuk pembebasan lahan yang berasal dari APBD Gresik sedangkan untuk normalisasi sebesar 5 miliar juga dari APBD Gresik.

Sumberdaya wewenang kali lamong milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) akan tetapi sungai kali lamong ini mengalir di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya sehingga untuk penanganan kali lamong yang berhubungan dengan masing-masing kabupaten sumberdaya peralatan untuk normalisasi berupa bego dan alat berat yang berasal dari Dinas PUTR. Sedangkan sumberdaya peralatan untuk pembuatan tanggul yakni berupa pembebasan lahan dengan cara membeli bangunan rumah, sawah, tambak milik warga desa. Kemudian pada variabel disposisi atau sikap pelaksana dalam normalisasi yakni pekerja nya tidak memilah

sampah dan tanah sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan untuk pembebasan lahan Pemkab memberikan bantuan sembako untuk warga desa yang jalannya rumahnya dilwati oleh truk besar.

Dan terdapat banyak faktor penyebab belum teralisasinya penanggulangan banjir kali lamong yakni terdiri dari faktor kewenangan, faktor keterbatasan anggaran, faktor tata ruang wilayah, faktor karakteristik sungai dan faktor manusia. Bentuk strategi penanggulangan banjir kali lamong yakni terdiri dari koordinasi antar instansi dan lembaga, manajemen resiko bencana, anggaran dan manusia.

## **B. Saran**

Banjir karena luapan kali lamong hingga saat ini masih sering terjadi di kabupaten Gresik hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik memiliki persentase 44% cakupan DAS Kali Lamong dengan luas 310,12 km<sup>2</sup>. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Pusat yakni Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) lebih memprioritaskan mengenai penanganan banjir kali lamong di daerah Gresik dengan cara menambah anggaran serta membuat manajemen resiko bencana banjir kali lamong.

Tentu nya untuk melaksanakan manajemen resiko bencana banjir kali lamong pemerintah kabupaten Gresik melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan antar lembaga serta Pemerintah kabupaten lainnya yang teraliri sungai kali lamong agar bencana banjir kali lamong segera terselesaikan. Hal ini juga dibarengi dengan warga masyarakat yang berada di bantaran sungai kali lamong ikut kooperatif bila terjadi pembebasan lahan dengan cara tidak mematok harga tanah yang tinggi. Dan juga tidak membuang sampah sembarangan di kali lamong

## DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm 21
- Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, edisi 2 (jakarta : Bumi Aksara, 2011)
- Juliansa Noor, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta : Kencana, 2017) hlm 76.
- Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2006), edisi revisi, 3.
- Suharsimi dan Arikunti, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 28
- Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm 135.
- Lexy J. Moleong. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya. Hlm 22.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 72
- Patton, Michael Quinn, Metodologi Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm 250.
- Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21
- Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), 3.
- Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Remaja Rosdakarya, (Bandung,2008), 143.
- Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), 4.
- Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar, 183.
- Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2006), edisi revisi, 3.
- Suharsimi dan Arikunti, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 28
- Raihan, Metodologi Penelitian (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017)
- Hadi, Asrori, and Rusman, Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi.
- 1Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Tata Cara Pembuatan Kolam Retensi Dan Polder Dengan Saluran-Saluran Utama. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

### **Dokumen**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gresik 2021-2026

Dokumen Paparan Pengendalian Banjir Kali Lamong milik Bappeda

### **Undang-Undang (Peraturan)**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik-BangkalanMojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan- Kawasan Bromo-Tengger Semeru, serta Kawasan Selingskar Wilis dan Selatan

Undang-Undang (Uu) No. 24, Ln.2007/No.66, Tln No.4723, Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 16 Perda Kabupaten Gresik No.8/2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Gresik tahun 2010-2030

### **Jurnal**

Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla dan Diana Hertati “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik*” Jurnal Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran

Eko Budi Santoso “*Manajemen Resiko Bencana Banjir kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan*” Jurnal Penaatan Ruang

Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

Amin Priatna, “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

Septian Boy Alpin Sitorus “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara*”. Asdaf Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.

Ari Mulianta Ginting “*Dampak Ekonomi dan Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2020*”. Vol.XII, No1/Puslit/Januari/2020

Natalia Yeti Puspita, Fachrudin Sembiring, Angga Reynady hermawan Putra “*Mitigasi Banjir Pada Saat Pandemi Covid 19: Sudah Siapkah*”

- Pemerintah DKI Jakarta?*”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undishka Vol.10 No.1 (Februari 2022)
- Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Akhmad Hendryan Dwifarma, Rizka Annisa Falmelia, Muhammad Shofwan Ridhani “*Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan*”. Volume 7 Nomer 3 Halaman 150-159 April 2022
- Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz “*Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot*”. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Noer 1 Januari 2020
- Indah Putri Rahayu, Welson Y. Rompas Salmin Dengo “*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Sangkil)*” JAP No.105 Vol. VII 2021
- Suharto dan Andre Setiawan “*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD Kota Semarang Tahun 2020)*” Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Vol 19, No 2, 2022
- Dina Mary Pasaribu “*Tinjauan Perundangan Terhadap Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan*”. Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, November 2021
- Candra Hermawan, Masjaya, Burhanudin “*Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengendalian Banjir di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu*”. Jurnal Pemerintahan, 2019, 7 (1): 465-478
- Ogtavianus F. Salles, S. E. Pangemanan, Frans. C. Singkoh “*Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Manado*”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020
- Putra, Fadillah “*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*” Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 2001
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*” Bandung: Alfabeta; 2017.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*” Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.
- Syafri Arief, Jumadi dan Abdullah, ”Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Makassar” (2016),
- Samsu, Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development), ed. Rusmini (Jambi: Pustaka Jambi, 2017).

Eko Budi Santoso “*Manajemen Resiko bencana banjir kali lamong pada kawasan peri-urban Surabaya-Gresik melalui pendekatan kelembagaan*” Jurnal Penataan Ruang, Volume 8, Nomer 2

### **Internet dan Media**

<https://surabaya.tribunnews.com/2012/05/30/lamongan-bangun-waduk-setinggi-20-meter> Di akses pada Kamis. 09 Maret 2023

<https://gresikkab.go.id/dokumen/pemerintah-kabupaten-gresik> Diakses pada 09 Maret 2023

<https://dipusda.bojonegorokab.go.id/berita/baca/20#:~:text=Normalisasi%20adalah%20untuk%20mengembalikan%20fungsi,berfungsi%20juga%20sebagai%20pengendali%20banjir.> Di akses pada 08 Januari 2023

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/43657> Diakses pada 02 Maret 2023

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo/portal/index.php/tag/kali-lamong/> diakses pada 09 Maret 2023

<https://surabaya.go.id/id/berita/58196/tinjau-tanggul-kali-lamong-wali-kota-risma-ingin-pastikan-kondisinya-kuat-menampung-aliran-air> diakses pada 04 maret 2023

<https://bnpb.go.id/berita/kali-lamong-meluap-semilan-desadi-gresik-terendam-banjir> diakses pada 02 Maret 2023

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A